

KEWARGANEGARAAN

Volume 18, Nomor 1 (2021): Maret 2021

**Perilaku Kewargaan Organisasi Bagi Guru Untuk
Meningkatkan Kinerja Profesi Keguruan**

Desy Brema Sevriani Ginting, Julia Ivanna, Ramsul Nababan

**Peran Tradisi *Boteng Tunggul* dalam Memperkuat *Civic
Culture* Masyarakat Adat Lombok**

Hamdi Abdullah Hasibuan, Ernawati Simatupang

**Pemahaman dan Pembinaan Norma Sopan Santun Melalui
PPKn Pada Anak Sekolah GBI Sukma Medan**

Rizky Agassy Sihombing, Jennie Febrina Hutagalung,
Pristi Suhendro Lukitoyo

***Role Playing* dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan**

T Heru Nurgiansah, Hendri, Cep Miftah Khoerudin

**Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di
Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai
Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan**

Maryatun Kabatiah

Diterbitkan oleh :
**Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan**

Volume 18, Nomor 1 (2021): Maret 2021
DOI Issue: 10.24114/jk.v18i1

ISSN Cetak: 1693-7287
ISSN Daring: 2745-6919



**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2021**

TIM EDITORIAL

- Pimpinan Redaksi : **Ramsul Nababan, S.H., M.H.**
ID Sinta 6040155; Universitas Negeri Medan
- Redaktur Pelaksana
(*Managing Editor*) : **Fazli Rachman, S.Pd., M.Pd.**
ID Sinta 6715512; Universitas Negeri Medan
- Penyunting
(*Section Editors*) : **Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.H.**
ID Scopus 57209455239; Universitas Negeri Medan
Hodriani, S.Sos., M.A.P.
ID Sinta 6036432; Universitas Negeri Medan
Julia Ivanna, S.Sos. M.A.P.
ID Sinta 6027575; Universitas Negeri Medan
Arief Wahyudi, S.H., M.H.
ID Sinta 6031026; Universitas Negeri Medan
Prayetno, S.I.P., M.Si.
ID Sinta 6037392; Universitas Negeri Medan
- Mitra Bestari (*Reviewers*) : **Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si.**
ID Scopus 56976350500; Universitas Pendidikan Indonesia
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.
Scopus ID 57202612275; Universitas Negeri Makassar
Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si.
Scopus ID 57216201207; Universitas Syiah Kuala
Dr. Deny Setiawan, M.Si.
ID Scopus 57194654748; Universitas Negeri Medan
Dr. Samsuri. S.Pd., M.Ag.
ID Sinta 19178; Universitas Negeri Yogyakarta
- Desain Grafis
(*Graphic Design*) : **Abdinur Batubara, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan
Winda Wati Pinem, S.Sos., M.I.P.
Universitas Negeri Medan
- Tata Letak
(*Layout*) : **Maryatun Kabatiah, S.Pd., M.Pd.**
Universitas Negeri Medan
Jamaludin, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Medan
-

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Alamat Redaksi

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id | Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kewarganegaraan edisi ini sangat spesial, karena edisi ini merupakan edisi perdana diterbitkan secara daring melalui *Open Journal System* yang disediakan Universitas Negeri Medan. Secara daring, Jurnal Kewarganegaraan dapat diakses melalui laman <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>. Tidak berbeda seperti edisi konvensional Jurnal Kewarganegaraan tetap mempublikasi karya ilmiah berupa artikel hasil penelitian dan pemikiran ilmiah.

Volume 18, Nomor 1 (2021): Maret 2021 adalah edisi Jurnal Kewarganegaraan ke-34 yang telah terbit sejak edisi pertaman Juni 2004. Jurnal kewarganegaraan awalnya secara regular terbit pada Juni dan Desember. Namun, mulai edisi Volume 17, Nomor 1 (2020): September 2020, memutuskan untuk mengubah jadwal edisi terbitan menjadi Maret dan September. Secara konsisten Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan minimal 5 artikel setiap edisinya.

Pada edisi kali ini Jurnal Kewarganegaraan menerbitkan 5 artikel. Artikel pertama **“Perilaku Kewargaan Organisasi Bagi Guru Untuk Meningkatkan Kinerja Profesi Keguruan”** oleh **Desy Brema Sevriani Ginting, Julia Ivanna, Ramsul Nababan**. Artikel ini menyajikan kajian ilmiah tentang perilaku kewargaan organisasi (*organizational citizenship behavior*) yang diintegrasikan kedalam aktivitas profesional guru sebagai tenaga pendidik pada tingkat persekolahan dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kependidikan.

Artikel kedua berjudul **“Peran Tradisi *Boteng Tunggul* dalam Memperkuat *Civic Culture* Masyarakat Adat Lombok”** oleh **Hamdi Abdullah Hasibuan, Ernawati Simatupang**. Artikel ini meruokan hasil penelitian yang membentangkan hasil penelitian tentang keberadaan tradisi *Boteng Tunggul* yang memiliki unsur yang dapat memperkuat *civic culture* didalamnya. Artikel mendeskripsikan hasil penelitian tentang bagaimana dari tradisi *Boteng Tunggu* untuk menguatkan *civic culture* bagi masyarakat Lombok Timur. Artikel ini menunjukkan bahwa *Boteng Tunggul* menjadi budaya yang dapat menopang warga negara untuk mewujudkan identitas masyarakat adat Lombok. Tradisi yang secara regular dilaksanakan oleh masyarakat Lombok Timur dengan menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab serta toleransi di dalamnya menggambarkan a budaya kewarganegaraan dapat diperkuat dengan tetap melestarikan dan memajukan tradisi ini.

Artikel ketiga berjudul **“Pemahaman dan Pembinaan Norma Sopan Santun Melalui PPKn Pada Anak Sekolah GBI Sukma Medan”** oleh **Rizky Agassy Sihombing, Jennie Febrina Hutagalung, Pristi Suhendro Lukitoyo**. Artikel memaparkan bagaimana pemahaman dan pembinaan norma sopan santun melalui pembelajaran PPKn pada setiap anak sekolah minggu GBI Sukma Medan. Artikel ini dihasilkan dari penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi secara menyeluruh. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam artikel

menunjukkan bahwa anak-anak sekolah GBI Sukma Medan relatif kurang memahami konsep norma sopan santun. Hal ini sangat berkorelasi dengan nilai norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran PPKn yang telah mereka pelajari sebelumnya.

Keempat, artikel berjudul **“Role Playing dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”** oleh **T Heru Nurgiansah, Hendri, Cep Miftah Khoerudin**. Artikel ini ditulis atas dasar masalah mata pelajaran PPKn sebagai pembelajaran yang membosankan. Menariknya artikel ini memaparkan hasil penelitian penerapan *role playing* dalam pembelajaran PPKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran *Role Playing* berhasil membuat suasana pembelajaran semakin menarik, aktif, dan berhasil meningkatkan kemampuan akademik siswa khususnya pada materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

Terakhir, artikel dengan judul **“Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Melalui Teknik Klarifikasi Nilai Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”** oleh **Maryatun Kabatiah**. Artikel memaparkan hasil penelitian berkaitan penerapan teknik klarifikasi nilai untuk menguatkan pendidikan karakter dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Artikel ini dihasilkan dari penelitian *Pre-Experimental Design*, dengan metode rancangan *Intact Group Comparison*. Hasil penelitian dapat disimpulkan pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata kuliah PKn melalui teknik klarifikasi nilai lebih efektif dibandingkan dengan konvensional.

Akhirnya, segenap tim Jurnal kewarganegaraan edisi kali ini bermanfaat untuk para akademisi, guru, pemerhati kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan dan berbagai komunitas cendekia. Kami mengharapkan partisipasi melalui pengiriman artikel baik hasil penelitian dan pemikiran ilmiah pada edisi-edisi Jurnal Kewarganegaraan lanjutnya.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan bagi para pembaca. Semoga edisi ini menambah khazanah dan memperdalam keilmuan kita sebagai respon terhadap tantangan zaman. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis dan penyunting yang telah bekerja keras hingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan. Kepada pembaca kami mengucapkan selamat membaca.

Medan, 30 Maret 2021

REDAKASI

DAFTAR ISI

VOLUME 18, NOMOR 1 (2021): MARET 2021

	PENGANTAR REDAKSI	iii
	DAFTAR ISI	v
	PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASI BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PROFESI KEGURUAN	1
	Desy Brema Sevriani Ginting, Julia Ivanna, Ramsul Nababan	1
	PERAN TRADISI <i>BOTENG TUNGGUL</i> DALAM MEMPERKUAT <i>CIVIC CULTURE</i> MASYARAKAT ADAT LOMBOK	19
	Hamdi Abdullah Hasibuan, Ernawati Simatupang	19
	PEMAHAMAN DAN PEMBINAAN NORMA SOPAN SANTUN MELALUI PPKN PADA ANAK SEKOLAH GBI SUKMA MEDAN	37
	Rizky Agassy Sihombing, Jennie Febrina Hutagalung, Pristi Suhendro Lukitoyo	37
	<i>ROLE PLAYING</i> DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	56
	T Heru Nurgiansah, Hendri, Cep Miftah Khoerudin	56
	EFEKTIVITAS PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI MELALUI TEKNIK KLARIFIKASI NILAI PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	65
	Maryatun Kabatiah.....	65

PERILAKU KEWARGAAN ORGANISASI BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PROFESI KEGURUAN

Desy Brema Sevriani Ginting*¹, Julia Ivanna², Ramsul Nababan³

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
*gtgdesy@gmail.com

Abstract

The teacher is the most important factor in the field of education because the teacher is the driving force of education for students in achieving educational goals. If there is a managerial role from the leader, the teacher will be able to teach the school the best. Therefore, the principal must be able to motivate teachers to improve teacher performance. This article aims to determine the performance of OCB (Organizational Citizenship Behavior) in teacher leadership and integrity. This article uses the literature study method. Therefore, the principal must be able to stimulate teachers to improve their performance.

Keywords: *organizational citizenship behaviour, teacher performance*

Abstrak

Guru adalah faktor yang terpenting dalam bidang pendidikan, karena guru adalah penggerak pendidikan bagi siswa mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal peran manajerial dari pemimpin maka guru akan mampu melakukan pengajaran yang terbaik sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu memotivasi guru dalam meningkatkan kinerja guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perilaku kewargaan organisasi dalam kepemimpinan dan integritas guru. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Karena itu, kepala sekolah harus bisa merangsang guru untuk meningkatkan kinerjanya.

Kata kunci: perilaku kewargaan organisasi, kinerja guru.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam hidup kita, artinya setiap orang berhak atas pendidikan. Secara umum, pendidikan mengacu pada proses kehidupan mengembangkan diri setiap orang untuk hidup dan terus hidup. Sejalan dengan pembukaan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, namun yang terpenting adalah mendidik di lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah memang membutuhkan perhatian pemerintah guna mencapai tujuan nasional. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini guru merupakan salah satu bagian terpenting dalam pendidikan, karena guru memegang peranan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, karena guru berhubungan

Sejarah Artikel: Dikirim 4 Desember 2020 | Direvisi hingga 2 Februari 2021

Diterima 10 Februari 2021 | Dipublikasikan 30 Maret 2021

Copyright © 2021, Desy Brema Sevriani Ginting, Julia Ivanna, Ramsul Nababan

DOI: 10.24114/jk.v18i1.21395

langsung dengan peserta didik, sekaligus melaksanakan pendidikan iptek yang bernilai positif, tanpa melupakan unsur lain, antara lain tujuan pendidikan, peserta didik, mata pelajaran, lingkungan pendidikan, serta interaksi pendidikan dan alat pendidikan.

Guru adalah salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan (khususnya sekolah). Jika sifat pembelajaran, yaitu interaksi guru-siswa tidak memenuhi syarat, semua komponen lain mulai dari kurikulum, infrastruktur, biaya, dll, tidak akan masuk akal. Nyatanya, semakin banyak orang yang menyadari bahwa tidak ada guru dan tidak ada pendidikan formal. Tanpa jumlah guru profesional yang memadai, tidak akan ada pendidikan yang berkualitas. Peran guru dalam mentransformasi investasi pendidikan sangat penting sehingga banyak ahli menyatakan bahwa di sekolah, kualitas guru tidak akan berubah atau ditingkatkan tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru.

Supadi & Listyasari (2018) berpendapat guru memiliki peran strategis dalam menentukan mutu pendidikan. Hal ini terkait dengan peran penting guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa, dan merupakan posisi yang paling aktif untuk berinteraksi dengan siswa. Keadaan ini menjadikan status guru sangat penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam kondisi seperti itu, guru memiliki andil besar dalam mencapai tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pusat pembelajaran. Karena itu, guru dituntut untuk memainkan peran tambahan yang dibutuhkan oleh sektor pendidikan.

Selain modal sosial dan kecerdasan emosional, guru juga harus berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi sekolah. Melalui kerja sukarela untuk membantu siswa, kolega, dan sekolah, menunjukkan kemauan untuk melampaui tanggung jawab utama mereka, menjaga kepentingan organisasi sekolah, dan mempromosikan diri, siswa, dan organisasi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tentunya para guru membutuhkan perilaku tersebut untuk mencapai tujuan sekolah. Robbins & Judge (2008) memberikan dukungan untuk hal tersebut, yaitu organisasi dengan *Organizational Citizenship Behavior* (selanjutnya, OCB/perilaku kewarganegaraan organisasi) yang tinggi akan berkinerja lebih baik dari organisasi lain. Perilaku OCB disebut perilaku warga organisasi. Melalui perilaku kewarganegaraan organisasional, kinerja sosial dapat ditingkatkan sehingga merangsang modal sosial dan kecerdasan emosional.

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja guru adalah adanya perilaku warga organisasi dalam diri guru atau pendidik. Dalam hal ini setiap pimpinan berkewajiban untuk menunjukkan kepedulian kepada guru agar dapat bekerja sesuai dengan petunjuk yang diberikan sehingga tercipta kondisi dan lingkungan kerja, dan mendorong perkembangan kegiatan kerja untuk secara efektif mencapai tujuan sekolah.

Penguasaan kemampuan yang memadai tidak sepenuhnya mendukung kinerja guru, sehingga perlu dilakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan guru. Jika guru melaksanakan tugas-tugas berikut, antara lain loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, disiplin mengajar dan tugas-tugas lainnya, mengerahkan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran, dan bekerjasama dengan seluruh warga sekolah, maka dapat dikatakan kinerja guru tersebut baik. Kepemimpinan guru menjadi panutan bagi siswa, berkepribadian baik, jujur dan objektif kepada siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya sendiri.

Purba & Seniati (2004) menjelaskan perilaku yang dimaksudkan sebagai OCB juga merupakan perilaku individu, dan individu harus melampaui apa yang harus dia lakukan untuk menunjukkan individu terbaiknya. *Extra role* behavior merupakan perilaku dalam bekerja, tidak termasuk dalam job description resmi pegawai, namun jika ditampilkan oleh pegawai akan sangat dihargai, karena dapat meningkatkan efektivitas dan kelangsungan organisasi.

Kinerja perilaku warga organisasi (OCB) sebagai bagian dari perilaku *extra-role* juga memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan kurangnya motivasi guru untuk melakukan perilaku peran ekstra di sekolah. Sebagian besar guru dipaksa untuk melakukan perilaku peran tambahan, bukan karena mereka mau dan ingin mendorong perkembangan sekolah. Dari uraian di atas, terlihat bahwa kinerja guru kurang memadai, karena guru kurang memahami peran guru. Sikap tidak peduli terhadap visi dan misi sekolah turut berperan dalam rendahnya kinerja, dan kebijakan kepemimpinan tidak menyentuh motivasi dasar guru untuk berinovasi guna meningkatkan kualitas kerja guru.

PEMBAHASAN

Guru Sebagai Tenaga Pendidik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya, UU Sisdiknas) menjelaskan guru termasuk dalam kategori pendidik. Padahal guru dan pendidik adalah dua hal yang berbeda, istilah pendidik (dalam bahasa Indonesia) adalah pedanan, dan istilah pendidik (dalam bahasa Inggris). Danim (2010, hal. 17) mengatakan dalam kamus webster, istilah *educator* adalah *educationist* atau *educationalist*, yaitu pendidik dalam bahasa Indonesia. Istilah guru (bahasa Indonesia) sama dengan *teacher* (bahasa Inggris). Dalam kamus Webster, kata "guru" berarti "terutama seseorang yang mengajar di sekolah", atau guru adalah orang yang mengkhususkan diri dalam mengajar di sekolah. Menurut Pasal 39 (2) UU Sisdiknas menyebutkan "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".

Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya PP Guru) menyebutkan bahwa "guru adalah pendidik dan guru yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini melalui sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah". Guru karenanya guru harus memenuhi standar kualifikasi profesional. Secara garis besar, siapapun yang mengajarkan hal-hal baru juga bisa dianggap sebagai guru. Secara formal, guru mengacu pada guru di sekolah negeri atau swasta yang memiliki kemampuan menjadi guru berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal sarjana, dan memiliki persyaratan hukum untuk menjadi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (selanjutnya UU Guru dan Dosen) yang berlaku di Indonesia saat ini. Guru merupakan kunci utama peningkatan mutu pendidikan, karena syarat penting untuk mencapai pendidikan yang bermutu adalah pendidikan harus dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang dapat mengandalkan profesionalitasnya.

Dalam proses pelaksanaannya diperlukan perubahan sikap dan perilaku seluruh departemen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan penyelenggara, termasuk orang tua dan masyarakat, dalam hal pengamatan, pemahaman dan pendampingan, serta supervisi dan evaluasi penyelenggaraan sekolah. Heryati & Muhsin (2014) meyakini bahwa tenaga pengajar adalah orang yang terlibat dalam tugas pendidikan yaitu guru/dosen, manajer/administrator, pengawas dan pegawai. Perlu melatih pendidik untuk lebih bekerja sama dengan masyarakat. Menurut UU Sisdiknas, tugas dan fungsi pendidik dan pendidik adalah: (1) pendidik adalah tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi dan universitas, (2) tugas pendidik adalah memberikan pelayanan administrasi, pengelolaan, pembinaan, supervisi dan teknis untuk menunjang proses pendidikan di bidang pendidikan.

Nur (2009) mengemukakan tugas dan tanggung jawab pendidik: (1) Dalam jalur pendidikan formal yang bertanggung jawab atas pendidikan dasar dan menengah (termasuk pendidikan anak usia dini), guru bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran dan bertanggung jawab untuk memotivasi, mempromosikan, mendidik, membimbing dan melatih siswa sehingga mereka dapat menjadi orang yang berkualitas; sementara (2) Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran, memotivasi, membina mahasiswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menjadi insan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan potensi insani sebaik-baiknya dan berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi/ atau seni dengan melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat; (3) Konselor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konsultasi bagi siswa di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) Pamong pembelajaran adalah bertanggung jawab dan menginstruksikan, mengajar, melatih siswa dan mengembangkan: model proses pembelajaran, perangkat pembelajaran dan manajemen pembelajaran pada jalur pendidikan informal; (5) Widyaiswara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik dalam program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau pemerintah daerah; (6) Pengajar atau tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada siswa dalam proses belajar mandiri atau dalam proses belajar kelompok di satuan pendidikan formal dan nonformal; (7) Instruktur bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik dalam kursus atau pelatihan; (8) Fasilitator bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan pembelajaran kepada lembaga pendidikan dan pelatihan; (9) Pelatih memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelatihan teknis olahraga kepada siswa di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Kinerja Guru

Selain faktor lain seperti siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, guru menjadi faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan. Guru memegang peran strategis dalam bidang pendidikan, tanpa dukungan guru yang berkualitas, sumber daya pendidikan lain yang sesuai biasanya tidak akan berarti. Dengan kata lain, guru berada di garis depan dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kinerja guru. Proses peningkatan kinerja guru telah terbentuk dan berlangsung dalam kegiatan mengajar di tempat kerja. Selain itu, kinerja guru juga dipengaruhi oleh bimbingan dan

supervisi kepala sekolah (Pidarta, 1992, hal. 3). Tentunya urgensi peningkatan kinerja guru sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pendidik. Dari hal tersebut terlihat bahwa guru dengan kinerja yang tinggi akan mampu mengelola pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan mencapai hasil yang maksimal, begitu pula sebaliknya.

Menurut Yamin (2010, hal. 87) kinerja guru adalah suatu perilaku atau reaksi yang hasil kerjanya merepresentasikan pekerjaannya dalam menyelesaikan tugas. Beberapa kegiatan tersebut antara lain; 1) kegiatan sebelum mengajar, 2) kegiatan selama masa mengajar, 3) kegiatan selama tahap mengajar, 4) kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi guru di masyarakat, pendidik atau lingkungan yang lebih luas. Supriyatno, Subiyanto, & Tawil (2016, hal. 173) kinerja merupakan hasil kerja atau prestasi kerja yang dilakukan oleh guru berdasarkan kemampuannya dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Mathis, & Jackson (2006) menjelaskan bahwa kinerja guru mempengaruhi kontribusinya terhadap organisasi.

Menurut Supardi (2016, hal. 73) kinerja guru yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mempersiapkan pengajaran, (2) Kemampuan melaksanakan pembelajaran, (3) Kemampuan menjalin hubungan interpersonal, (4) Mampu mengevaluasi hasil belajar (5) Kemampuan melaksanakan pengayaan (6) Kemampuan melaksanakan remedial. Kinerja dalam pengertian ini disebut juga prestasi kerja. Kinerja adalah hasil atau keseluruhan tingkat keberhasilan seseorang dalam kurun waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, seperti standar kerja, indikator atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru yang berprestasi biasa disebut guru profesional (Jalal & Supriadi, 2001).

UU Guru dan Dosen adalah aturan politik yang mengatur bahwa pendidik adalah pekerja profesional dan berhak menikmati hak dan tugas profesional. Dengan cara ini, diharapkan para pendidik dapat mengabdikan diri pada profesinya dan menjalani kehidupan yang layak dari profesinya tersebut. UU Guru dan Dosen dan menjelaskan bahwa (1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kemampuan sebagai agen pembelajaran; (2) sesuai dengan tanggung jawab guru S2 sebagai dosen, gelar dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV); (3) kemampuan profesional guru meliputi kemampuan mengajar, kemampuan personal, kemampuan profesional dan kemampuan sosial. UU Guru dan Dosen secara holistic muatan segala hal guru dan dosen, namun penulis disini lebih menekankan pembahasan tentang hak dan kewajiban guru dan dosen dalam pendidikan. Hak Guru (Pasal 14 UU Guru dan Dosen) dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru berhak untuk: (1) memperoleh penghasilan melebihi batas minimum hidup dan kesejahteraan social; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan prestasi; (3) terlindungi dalam pelaksanaan tugas dan hak kekayaan intelektual; (4) mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung kelancaran tugas profesional; (6) mengevaluasi peserta didik dan berpartisipasi dalam penentuan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi sesuai dengan prinsip pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan; (7) mendapatkan rasa aman saat menjalankan tugas, (8) Bebas untuk mengatur organisasi profesional; (9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; (10) memiliki peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi dan kemampuan akademik; (11) mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional di bidangnya masing-masing

Ketentuan lain mengenai hak guru diatur dalam PP 19 Tahun 2017. Selain hak di atas, guru juga berhak menerima penghasilan dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 19. Guru berhak menerima penghasilan melebihi kebutuhan sehari-hari, termasuk upah pokok, upah, dan tunjangan penghasilan lainnya dalam bentuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan lain yang berkaitan dengan mengabdikan sebagai guru.

Prestasi guru merupakan tingkah laku guru ketika menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, kinerja guru mengacu pada hasil pengajaran yang dicapai oleh kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Sebagai hasil logis dari para profesional pendidikan. Mulyasa (2004) berkeyakinan bahwa guru dengan kinerja tinggi akan bersemangat dan akan berusaha meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk memperoleh hasil kerja yang terbaik. Sejalan dengan itu, Rusman (2009, hal. 319) meyakini bahwa bentuk perilaku yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah cara guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan pembelajaran lanjutan.

Kewajiban Guru (Pasal 20 UU Guru) menjalankan tugas profesional, guru harus: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran berkualitas tinggi, dan serta mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kemampuan akademik secara berkelanjutan; (3) bertindak obyektif dan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi siswa dalam menempuh pendidikan; (4) menjunjung tinggi peraturan-peraturan undang-undang, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; (5) menjaga dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

PP Guru menjelaskan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: (1) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; (2) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; (3) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selain itu menurut Astuti & Dacholfany (2016, hal. 206) kinerja guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar, meliputi beberapa indikator: (1) membuat rencana pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) melaksanakan evaluasi pembelajaran; (4) melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran. Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan standar kinerja tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mangkunegara (2004, hal. 67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu: pertama, faktor kemampuan; Secara psikologis, kemampuan guru meliputi kemampuan potensial (IQ) dan kemampuan realistik (pengetahuan + keterampilan). Artinya, guru dengan tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan bidangnya dan mampu melakukan pekerjaan sehari-hari lebih mudah mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu diberikan pekerjaan berdasarkan pengetahuan

profesionalnya. Dengan mengatur guru sesuai bidangnya, mereka mampu membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kedua, faktor motivasi; Motivasi dibentuk oleh sikap guru dalam menangani situasi kerja. Motivasi merupakan suatu kondisi yang dapat membuat perkembangan langsung menuju terwujudnya tujuan pendidikan. Dalam bukunya Anwar Prabu, C. Mecllland mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dan kinerja (Mangkunegara, 2004, hal. 68). Dalam bidang psikologi, masalah motivasi semacam ini selalu mendapat perhatian khusus dari para ahli. Karena motivasi itu sendiri adalah gejala jiwa, dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan atau melakukan sesuatu keinginan dan kebutuhan.

Syah, Wardan, Rakhmat, & Muchlis (1997) percaya bahwa motivasi adalah keadaan internal organisme, apakah itu manusia atau hewan, mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Alisuf (1996) meyakini bahwa motivasi adalah keadaan dalam tubuh manusia yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Guru sebagai pendidik memikul tanggung jawab dan tanggung jawab yang berat. Guru harus sadar bahwa dirinya harus serius, bertanggung jawab, ikhlas, dan tidak ceroboh dalam melakukan tugasnya dengan baik agar siswa dapat dengan mudah menerima semua yang dikatakan guru. Jika ini dilakukan, guru akan berprestasi.

Menurut Nasution (2000), guru berperan penting dalam pengembangan diri anak dengan memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan serta membentuk kepribadian. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang guru yang dapat mempersiapkan berbagai kemampuan mendidik dan membimbing siswa dengan membantu mereka mencapai kedewasaan secara mandiri. Guru harus memiliki kemampuan profesional dalam kegiatan pembelajaran, meliputi penguasaan materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, bimbingan dan konsultasi, serta penilaian pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran, guru harus mampu mengelola seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan menciptakan kondisi pembelajaran agar setiap siswa dapat belajar secara efektif. Dalam perannya sebagai evaluator hasil belajar, guru harus selalu memperhatikan hasil belajar siswa. Informasi yang diperoleh melalui penilaian ini akan digunakan sebagai umpan balik dan sebagai titik awal untuk perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran guna mencapai prestasi akademik siswa. Selain itu, Mac Leland mengemukakan 6 karakteristik guru dengan motivasi berprestasi tinggi dalam Nasution (2000) yaitu: (1) memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi; (2) berani mengambil resiko; (3) memiliki tujuan yang realistis; (4) menggunakan rencana kerja yang komprehensif untuk berusaha mencapai tujuan; (5) menggunakan umpan balik khusus dalam semua aktivitas pekerjaannya; dan (6) mencari peluang untuk menerapkan rencana yang direncanakan.

Kartini (1985) mengemukakan bahwa faktor-faktor pendukung kinerja guru dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: pertama, faktor internal meliputi: (a) kecerdasan: kecerdasan memainkan peran penting dalam berhasil melaksanakan tugas pendidik dalam proses pembelajaran. Semakin kompleks dan makmur tugasnya, semakin tinggi kecerdasan yang dibutuhkan. Orang cerdas yang melakukan tugas-tugas sederhana dan monoton mungkin bosan dan menyebabkan penurunan kinerja, (b) keterampilan dan kecakapan: Orang memiliki keterampilan dan kecakapan yang berbeda. Ini karena perbedaan antara pengalaman dan praktik, (c) bakat: Kecocokan antara bakat dan pilihan pekerjaan memungkinkan seseorang untuk bekerja sesuai dengan pilihan dan keterampilan mereka (d) kemampuan dan minat: persyaratan untuk memperoleh keamanan kerja seseorang adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Kemampuan dengan minat yang tinggi dapat mendukung pekerjaan yang sudah ditekuni, (e) motivasi: motivasi dapat mendorong pekerjaan seseorang meningkat, (f) kesehatan: kesehatan dapat membantu menyelesaikan proses kerja seseorang. Jika kesehatan terganggu, pekerjaan juga akan terganggu (g) kepribadian: orang yang kuat dan sangat terintegrasi mungkin menghadapi lebih sedikit kesulitan dan akan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan berinteraksi dengan rekan kerja untuk meningkatkan pekerjaan mereka, (h) Tujuan kerja: Jika pekerjaan seseorang memenuhi cita-cita, maka tujuan itu dapat tercapai karena ia bekerja keras, dan sepenuh hati. Kedua, faktor eksternal meliputi: (a) lingkungan keluarga: lingkungan keluarga mempengaruhi kinerja seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga akan mengurangi keinginan untuk bekerja, (b) lingkungan kerja: lingkungan kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang untuk bekerja secara maksimal. Tidak jarang seseorang mengalami kekecewaan dan kegagalan di tempat kerja. Lingkungan kerja yang disebutkan di sini adalah semacam situasi kerja, rasa aman, upah yang memadai, peluang pengembangan karir dan rekan kerja yang populer, (c) komunikasi dengan kepala sekolah: komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang efektif. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, (d) sarana dan prasarana: Terdapat sarana dan prasarana yang sesuai untuk membantu guru meningkatkan kinerja, khususnya dalam proses pengajaran, (e) kegiatan guru di kelas: Pendidikan harus ditingkatkan secara bertahap. Apabila manajemen sekolah tidak memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas guru maka motivasi guru dalam pengembangan rencana pembelajaran tidak akan ada artinya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Begitu pula jika pihak manajemen sekolah kurang memperhatikan optimalisasi penggunaan sumber belajar tersebut dalam proses pembelajaran, penambahan sumber belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan membantu.

Menurut Rosyada (2004) aktivitas guru di dalam kelas meliputi: (1) guru harus membuat rencana pembelajaran yang bijaksana; (2) guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa; (3) guru harus mengembangkan strategi pembelajaran untuk mengajar; (4) guru harus menguasai kelas; (5) guru harus mengevaluasi dengan benar. Menurut Purwanto (2003) berpartisipasi dalam bidang administrasi, dimana dalam bidang administrasi guru memiliki kesempatan yang cukup untuk mengikuti kegiatan sekolah, antara lain: (1) Mengembangkan konsep pendidikan; (2) Meningkatkan dan menyesuaikan kurikulum; (3) Mengembangkan rencana pengawasan; (4) Perencanaan kebijakan kepegawaian. Semua pekerjaan harus diselesaikan oleh satu guru dengan guru lainnya bersama-sama, yaitu melalui musyawarah. Untuk meningkatkan kinerja, guru harus memeriksa status pemimpin (kepala sekolah). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas guru dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemampuan supervisi yang dilakukan supervisor atau supervisi kinerja guru.

Perilaku Kewarganegaraan Organisasi Guru

Organizational Citizenship Behavior (OCB) diterjemahkan perilaku kewarganegaraan organisasi (PKO) dalam bahasa Indonesia, adalah kontribusi "di atas dan di luar" pekerja untuk deskripsi pekerjaan formal (Smith et al., dalam Titisari, 2014). Perilaku kewarganegaraan organisasi adalah kontribusi pribadi yang melampaui persyaratan peran di tempat kerja. Ini juga melibatkan beberapa perilaku, termasuk

membantu orang lain dan partisipasi sukarela. Untuk tugas tambahan, harap ikuti aturan dan prosedur tempat kerja (Titisari, 2014).

Organ, Podsakoff, & MacKenzie (2005) mendefinisikan perilaku kewarganegaraan organisasi sebagai perilaku bebas, perilaku pribadi tidak secara langsung atau jelas terkait dengan sistem penghargaan, yang dapat meningkatkan operasi organisasi yang efektif. Perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) juga biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang melampaui kewajiban formal (peran ekstra) tidak terkait dengan kompensasi langsung. Prinsip dasar munculnya perilaku kewarganegaraan organisasi tidak terlepas dari fenomena yang disebut "warga negara yang baik". Warga negara yang baik adalah orang-orang yang membantu tetangga, memilih, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, dll. Dengan kata lain, seseorang melakukan tindakan yang tidak perlu tetapi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Komalasari, Nasih, & Prasetyo, 2009). Artinya orang dengan perilaku organisasional yang tinggi tidak akan mendapatkan bayaran dalam bentuk uang atau bonus tertentu, tetapi perilaku kewarganegaraan organisasi lebih pada perilaku sosial dimana pekerjaan setiap orang melebihi ekspektasi, seperti membantu rekan kerja secara sukarela menunda rapat sebagai sebuah contoh. Guru dengan perilaku warga organisasi yang tinggi akan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja guru.

Menurut Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach (2000) PKO akan mempengaruhi keefektifan organisasi pada bidang tertentu. Pertama-tama, PKO dapat membantu rekan kerja kita untuk bekerja dengan baik di lingkungan kerja. Kedua, PKO dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan. Ketiga, DPKO akan membantu secara efektif meningkatkan penggunaan sumber daya organisasi untuk alasan produksi. Keempat, PKO dapat mengurangi sumber daya organisasi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan karyawan. Kelima, Departemen Penjaga Perdamaian dapat secara efektif mengoordinasikan aktivitas antar anggota tim dan kelompok kerja. Keenam, PKO dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat dengan mempromosikan organisasi sebagai tempat kerja yang menarik. Ketujuh, PKO dapat meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. Akhirnya, PKO dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah.

Sinha (2009) mengemukakan sudut pandang berikutnya, yaitu, "perilaku kewarganegaraan organisasi berarti mengambil tanggung jawab atas suatu organisasi dan melakukan segala upaya untuk membantu menciptakan organisasi yang lebih baik." Lebih lanjut, Sinha percaya bahwa perilaku kewarganegaraan organisasi berarti mengambil tanggung jawab atas organisasi Anda dan melakukan segala kemungkinan untuk membantu membangun organisasi yang lebih baik. Pandangan McShane & Von Glinow (2010) mendukung pandangan ini, dan mereka menunjukkan bahwa "OCB adalah dukungan dari berbagai bentuk kerjasama dan bantuan kepada orang lain dalam lingkungan sosial dan psikologis suatu organisasi." Pendapat tersebut menjelaskan bahwa OCB merupakan berbagai bentuk kerjasama yang dapat membantu sesama mendukung lingkungan sosial dan psikologis organisasi.

Pandangan Sinha menekankan bahwa guru dan pendidik dengan OCB yang lebih tinggi akan bertanggung jawab atas segalanya untuk menjadikan sekolah lebih baik. Jika sekolah menemui kesulitan dalam mencapai visinya, guru dan pendidik dengan OCB lebih tinggi akan enggan. Mereka secara sukarela akan memberikan kontribusi terbesar

untuk mewujudkan visi sekolah dengan sebaik-baiknya. Pada saat yang sama, McShane dan Glinow (2010) menekankan bahwa guru dan pendidik dengan OCB yang lebih tinggi akan selalu bekerja sama untuk mewujudkan visi sekolah. Sebagai sebuah organisasi, sekolah tentunya membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Hasil penelitian Eyupoglu (2016) menunjukkan bahwa perilaku OCB memiliki pengaruh yang baik terhadap institusi pendidikan. Institusi pendidikan yang ingin bertahan harus menghadirkan OCB.

Fakta menunjukkan bahwa organisasi dengan perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) yang baik dengan karyawannya akan berkinerja lebih baik daripada organisasi lain (Robbins & Judge, 2008, hal. 40). Mengenai indikator perilaku kewarganegaraan organisasional, Organ dalam Herminingsih (2012, hal. 128–129) berpendapat bahwa perilaku sipil atau peran tambahan diwujudkan melalui lima bentuk perilaku, yaitu: (1) Altruisme (tindakan membantu orang lain) adalah inti dari kepedulian terhadap kepentingan orang lain, seperti membantu rekan baru dan menyediakan waktu untuk orang lain. Aspek ini mengarah pada bantuan, yang bukan merupakan kewajibannya, (2) *conscientiousness* (rajin dan hati-hati atau disiplin) adalah perilaku pencegahan, seperti penggunaan waktu yang efektif dan kehadiran yang tinggi. Perilaku ini berupaya untuk melebihi ekspektasi perusahaan atau perilaku sukarela, daripada kewajiban atau pekerjaan karyawan, (3) *sportmanship* (sportivitas) adalah memaksimalkan total waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan konstruktif dalam organisasi. Dapat mentolerir situasi ideal dalam organisasi tanpa menimbulkan perbedaan pendapat. Sportivitas akan menciptakan suasana yang positif di antara karyawan, dan karyawan akan lebih santun serta bekerja sama dengan sesama sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan, (4) *courtesy* (menjaga hubungan baik) Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja untuk menghindari masalah interpersonal. Seseorang dengan dimensi ini adalah seseorang yang menghormati dan peduli pada orang lain, seperti bersikap sopan, patuh kepada rekan kerja bahkan atasan, (5) *civic virtue* (kebijaksanaan pekerja) adalah perilaku yang menunjukkan tanggung jawab terhadap kehidupan organisasi, seperti mengikuti perubahan dalam organisasi, melakukan tindakan proaktif untuk menyarankan bagaimana memperbaiki operasi atau prosedur organisasi, dan melindungi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dimensi ini mengarahkan organisasi untuk memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas wilayah kerja tempat mereka bekerja.

Borman dan Motowidlo dalam Novliadi (2007, hal. 6) mengungkapkan bahwa perilaku kewarganegaraan organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi, karena perilaku inilah yang menjadi “pelumas” mesin sosial dalam organisasi. Dengan kata lain, melalui perilaku ini maka interaksi sosial organisasi menjadi lebih lancar. , mengurangi terjadinya perselisihan, dan meningkatkan efisiensi. Guru dan pendidik yang menerapkan OCB akan mampu meningkatkan kinerjanya. Nasir et al. (2011) mengemukakan bahwa perilaku kewarganegaraan organisasional berdampak pada kinerja. Oleh karena itu, perilaku OCB sangat penting bagi guru dan pendidik.

Oktavianti, Dacholfany, & Sutanto (2019) menyatakan bahwa dalam bidang pendidikan, perilaku kewarganegaraan organisasi melibatkan membantu sesama dan menjadi upaya untuk menyelesaikan tugas tambahan serta mematuhi aturan dan prosedur tempat kerja. Perilaku kewarganegaraan organisasi dapat meningkatkan kinerja guru, karena perilaku ini merupakan interaksi sosial setiap anggota, yang nantinya dapat membuat semua orang stabil di sekolah, mengurangi terjadinya perselisihan, dan tentunya

meningkatkan efisiensi. Menurut Triandani (2017) perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan kontribusi pribadi yang melebihi persyaratan peran pekerjaan dan dihargai oleh penerima kinerja tugas. Menurut Ticoalu (2013) perilaku pribadi adalah bebas dan tidak langsung atau pengakuan eksplisit sistem penghargaan dan mempromosikan operasi organisasi yang efektif.

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep OCB guru dan pendidik adalah upaya sukarela yang melebihi tugas pokok, tanggung jawab dan fungsinya. Bentuk tindakan terhadap tugas pokok dan fungsi dapat berupa meluangkan lebih banyak waktu untuk melayani siswa. Bentuk lain adalah mau berbagi keterampilan dan pengetahuan dengan siswa lain. Untuk setiap guru atau karyawan dengan perilaku warga organisasi internal, upaya pengendalian guru akan berkurang, karena guru dapat mengontrol perilakunya sendiri dan dapat memilih perilaku terbaik untuk kepentingan organisasi, yang dapat lebih meningkatkan kinerja guru.

Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan, perilaku kewarganegaraan guru dan pendidik menekankan bagaimana guru dan pendidik memberikan waktu ekstra untuk tugas pokoknya. Misalnya, guru secara sukarela membimbing siswa untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ketika beberapa siswa sangat membutuhkan waktu ekstra untuk mencari buku di perpustakaan, pustakawan akan menyediakan lebih banyak waktu

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kewargaan Organisasi Profesi Guru

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kewargaan organisasi guru (Jayadi, 2012; Titisari, 2014), yaitu: pertama, kepuasan kerja adalah penentu utama perilaku kewarganegaraan organisasi karyawan. Karyawan yang puas lebih cenderung berkomentar positif tentang organisasi, membantu rekan kerja, dan melebihi ekspektasi kinerja kerja normal. Oleh karena itu, karyawan lebih bersedia untuk mematuhi tugasnya karena mereka ingin mengulangi pengalaman positif mereka. Kedua, komitmen organisasi merupakan faktor lain yang berperan dalam membentuk perilaku kewargaan organisasi. Komitmen afektif merupakan indikator prediktif dari perilaku kewargaan organisasional, sehingga komitmen organisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya perilaku kewargaan organisasional.

Ketiga, kepribadian, perbedaan individu adalah prediktor yang berperan penting dalam diri karyawan, oleh karena itu karyawan akan menunjukkan perilaku kewargaan organisasinya, sehingga dapat dianggap bahwa beberapa orang yang menunjukkan kepribadian lebih cenderung menunjukkan perilaku kewargaan organisasionalnya. Keempat, kepemimpinan transformasional mendorong karyawan untuk mengikuti visi organisasi dan memotivasi mereka untuk mencoba mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku organisasi yang diinginkan. Karyawan akan memberikan kontribusi diluar tanggung jawab formal (PKO) karena mereka termotivasi untuk mencapai visi organisasi tanpa meminta imbalan. Keenam, Kualitas hubungan atasan-bawahan, Perilaku kewarganegaraan organisasi juga dipengaruhi oleh hubungan antara atasan dan bawahan yang terjalin selama ini. Semakin dekat bawahan dengan atasan, semakin tinggi kepercayaan atasan dan perhatian atasan, semakin tinggi perilaku sipil organisasi karyawan.

Ketujuh, suasana organisasi mungkin menjadi alasan penting untuk pengembangan perilaku warga organisasi. Dalam suasana organisasi yang positif, karyawan akan lebih berkeinginan untuk melakukan pekerjaan daripada yang tertera pada *job description*, dan

jika diperlakukan oleh pemimpin yang unggul dengan semangat yang unggul dan pengetahuan yang lengkap, serta selalu percaya pada tujuan organisasi, dan mereka akan percaya organisasi memperlakukan mereka dengan adil. Ketujuh, budaya organisasi yang kuat akan mempengaruhi keintiman karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga budaya organisasi yang kuat dapat memperoleh kondisi yang baik dan mendukung munculnya perilaku warga organisasi.

Evaluasi Kinerja Guru

Evaluasi kinerja adalah metode dan proses untuk mengevaluasi kinerja seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja di suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan standar atau tujuan kinerja yang ditentukan sebelumnya (Simanjuntak, 2005, hal. 103). Sejalan dengan hal tersebut, Uno & Lamatenggo (2012, hal. 12) meyakini bahwa evaluasi kinerja adalah proses pengukuran kinerja individu, yang selalu membandingkan proses evaluasi dengan standar, sasaran/indikator atau standar yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Menurut Wirawan (2014, hal. 11) evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja yang berharga, dan dokumen yang didokumentasikan secara formal adalah untuk mengevaluasi kinerja yang berharga dengan membandingkan standar kinerja secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, Nawawi (2006, hal. 73) berpendapat bahwa penilaian kinerja juga diartikan sebagai kegiatan mengukur/mengevaluasi kinerja suatu pekerjaan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kerjanya masing-masing.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Referomasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, evaluasi kinerja guru merupakan evaluasi terhadap jabatan, pelatihan jabatan dan jabatan setiap item dalam kegiatan tugas pokok guru. Tugas utama guru sebagai pendidik vokasi adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik melalui pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Evaluasi kinerja guru mempunyai dua fungsi pokok, yaitu: (1) Menilai kinerja guru dalam tugas pokok dalam proses pembelajaran yang diterapkan, dan kinerja semua kemampuan yang ditunjukkan dalam membimbing atau melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja menjadi profil kinerja guru yang mampu menggambarkan kekuatan dan kelemahan guru. Profil kinerja guru juga dapat diartikan sebagai analisis kebutuhan atau review keterampilan masing-masing guru, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan guru, (2) Menghitung kredit yang diperoleh guru dalam belajar, mengajar, atau melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi sekolah/madrasah selama tahun pelaksanaan evaluasi kinerja guru; sebagai bagian dari proses pengembangan profesional dan promosi guru, evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun untuk mempromosikan guru dan mempertahankan posisinya.

Hasil evaluasi kinerja guru diharapkan dapat membantu menentukan berbagai kebijakan terkait peningkatan kemampuan dan profesionalisme guru sebagai pedoman pelaksanaan proses pendidikan untuk menumbuhkan individu yang cerdas, komprehensif, dan berdaya saing tinggi. Evaluasi kinerja guru menjadi acuan bagi sekolah/madrasah untuk mengetahui perkembangan profesionalitas dan promosi guru.

Menggabungkan konten di atas, evaluasi kinerja guru harus didasarkan pada standar kemampuan guru. Suparlan (2006) mengatakan standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai "ukuran yang ditetapkan atau ukuran yang diperlukan". Lebih lanjut ditegaskan bahwa "Standar Kompetensi Guru" merupakan ukuran yang ditentukan atau dipersyaratkan dengan cara penguasaan pengetahuan dan perilaku, agar guru memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan sesuai dengan jabatan, kualifikasi dan tingkat pendidikannya. Berdasarkan definisi tersebut, standar kompetensi guru dibedakan menjadi tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu: (1) manajemen pembelajaran, (2) pengembangan profesional, (3) kemahiran akademis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen standar kompetensi guru yang masing-masing terdiri atas beberapa kemampuan, komponen pertama terdiri dari empat kemampuan, dan komponen kedua satu kemampuan, dan komponen ketiga mencakup dua kemampuan. Oleh karena itu, ketiga komponen tersebut secara umum mencakup 7 (tujuh) kemampuan dasar, yaitu: (1) buat rencana studi, (2) menerapkan interaksi pengajaran, (3) evaluasi kinerja siswa, (4) melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja siswa, (5) pengembangan profesional, (6) pemahaman wawasan pendidikan, (7) menguasai materi penelitian akademik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Cari calon karyawan yang berhak dipromosikan, dan tulis saran lain, seperti reward, berdasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan pimpinannya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja adalah cara untuk mengoreksi mereka yang tidak berprestasi baik dalam organisasi. Dalam suatu organisasi, kemampuan untuk memperoleh posisi terbaik dan terpercaya dalam organisasi sangat bergantung pada pelaksanaan organisasi yaitu karyawan (Mangkunegara, 2004, hal. 67). Tugas utama guru sebagai pendidik vokasi yaitu mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain tugas pokok tersebut, guru juga dapat melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Dalam "Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012), evaluasi kinerja guru kelas/mata pelajaran dan tutor dilakukan dengan mengacu pada dimensi tugas pokok guru, meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, termasuk analisis hasil evaluasi dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian lingkup tugas pokok ini diturunkan sebagai indikator kinerja yang terukur, sebagai wujud kinerja pada saat guru melaksanakan tugas pokoknya, untuk mencerminkan kemampuan guru, khususnya kemampuan mengajar dan profesional.

Mengembangkan alat evaluasi kinerja untuk guru kelas/mata pelajaran dan guru BK/konselor, yang mencakup tiga (3) dimensi tugas pokok dengan indikator kinerja. Untuk setiap indikator kinerja setiap item tugas pokok, aturan evaluasi yang lebih rinci akan digunakan untuk mengevaluasi apakah kinerja kepemilikan kapabilitas terlihat dalam dokumen perencanaan (termasuk dokumen pendukung lainnya) dan hasil dari observasi yang dilakukan selama pengamatan pembelajaran.

Sedangkan evaluasi kinerja guru terkait tugas tambahan terkait fungsi sekolah/madrasah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, tugas lain untuk mengurangi waktu mengajar tatap muka meliputi: (a) kepala sekolah/madrasah, (b) wakil kepala sekolah/pesantren, (c) penanggung jawab rencana profesional/rencana studi, (d)

pustakawan, (e) penanggung jawab laboratorium, bengkel, unit produksi, dan lain-lain. Kedua, tugas lain yang tidak akan mengurangi waktu mengajar tatap muka meliputi: (a) tugas lain setidaknya selama satu tahun (misalnya, melayani sebagai guru kelas, pengawas perencanaan induksi, dan lain-lain), (b) tugas lain yang kurang dari satu tahun (misalnya, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan lain-lain).

Untuk guru yang menggunakan tugas tambahan untuk mengurangi waktu pengajaran tatap muka, evaluasi kinerja dievaluasi menggunakan alat khusus yang dirancang sesuai dengan dimensi tugas utama yang diperlukan untuk melakukan tugas tambahan ini. Serupa dengan evaluasi kinerja dan bimbingan guru belajar mengajar, evaluasi kinerja tugas tambahan juga menjelaskan secara rinci dimensi tugas utama sebagai indikator performa yang bias dipantau dan/atau diamati. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pemberian peringkat kredit dapat langsung memberi penghargaan pada tugas lain yang tidak mengurangi waktu mengajar guru.

PENUTUP

Guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Hak guru berupa kebebasan, yaitu sesuai dengan prinsip pendidikan, kewajiban guru (yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, undang-undang dan kode etik guru, serta keyakinan dan agama) untuk memberikan penilaian dan berpartisipasi dalam penetapan kelulusan, bentuk penghargaan dan/atau sanksi pada peserta didik. Kedudukan guru adalah seorang profesional, yang berperan untuk meningkatkan harkat dan martabat guru dalam pembelajaran, serta mengembangkan sains, teknologi, dan seni dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Menerapkan "Undang-Undang guru dan dosen" untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan beberapa tunjangan, antara lain gaji dan tunjangan gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Selain itu, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kemampuan dan sertifikat pendidik.

Untuk mengoptimalkan kinerja guru, kepala sekolah harus memperhatikan profesionalitasnya, karena guru yang labil memiliki kemampuan yang rendah, dan sikap orang dewasa tidak dapat terus ditampilkan di depan siswa untuk meningkatkan kinerja. Selain profesionalisme, komitmen organisasi juga sangat mempengaruhi kinerja guru, sehingga penanggung jawab yayasan harus memperhatikan keadaan keuangan agar guru dapat menjaga keadaan yang teratur. Pada saat yang sama, perilaku kewarganegaraan organisasi memiliki dampak penting pada variabel kinerja guru. Perilaku kewarganegaraan organisasi yang lebih tinggi secara kolektif menunjukkan kinerja guru. Sebaliknya, perilaku warga organisasi yang lebih rendah secara kolektif menunjukkan kinerja guru yang lebih rendah.

Untuk setiap guru atau karyawan dengan perilaku warga organisasi internal, upaya pengendalian guru akan berkurang, karena guru dapat mengontrol perilakunya sendiri dan dapat memilih perilaku terbaik untuk kepentingan organisasi, yang dapat lebih meningkatkan kinerja guru. Dapat disimpulkan bahwa perilaku kewarganegaraan

organisasi merupakan perilaku sukarela guru sekolah yang melebihi peran wajib dan persyaratan organisasi, oleh karena itu jika dilakukan oleh guru tidak ada sistem penghargaan, tetapi dapat secara efektif memberikan fungsi bagi organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sangat berterima kasih kepada bapak ibu dosen dan seluruh sahabat atas dukungan, perhatian, kritik dan sarannya demi terselesaikannya jurnal kajian ilmiah ini dengan benar. Saya juga ingin berterima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca artikel saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pada artikel saya, saya mohon maaf, saya sangat menantikan saran-saran konstruktif dari para pembaca agar dapat membuat artikel yang lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisuf, M. S. (1996). *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Astuti, R., & Dacholfany, M. I. (2016). Pengaruh Supervisi Pengawas Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP di Kota Metro Lampung. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 1(2), 204–217.
- Danim, S. (2010). *Profesionalisasi dan Tika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Eyupoglu, S. Z. (2016). The Organizational Citizenship Behaviour of Academic Staff in North Cyprus. *Procedia Economics and Finance*, 39, 701–704.
- Herminingsih, A. (2012). Spiritualitas Dan Kepuasan Kerja Sebagai Faktor Organizational Citizenship Behavior (OCB). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 126–14.
- Heryati, Y., & Muhsin, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (Ed.). (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Diterbitkan atas kerjasama Depdiknas, Bappenas, Adicita Karya Nusa.
- Jayadi, J. (2012). Kompetensi Guru, Spiritual Intelligence, Self Determination Theory dan Organization Citizenship Behavior. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 9(2), 169–184.
- Kartini, K. (1985). *Menyiapkan Memadukan Karir*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kebudayaan, K. P. dan. (2012). *Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Guru Buku 2: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Komalasari, P. T. T., Nasih, M., & Prasetyo, T. (2009). Pengaruh Public Service Motivation dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 2(2).

- Mangkunegara, A. P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- McShane, S., & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizational Behaviour: Emerging Knowledge and Practice for the Real World*. McGraw-Hill/Irwin.
- Mulyasa, E. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasir, R., Mohammadi, M. S., Wan Shahrazad, W. S., Fatimah, O., Khairudin, R., & Halim, F. (2011). Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Task Performance. *The social sciences*, 6(4), 307–312.
- Nasution, S. (2000). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar*. PT. Bina Aksara.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi Dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Novliadi, F. (2007). Organizational Citizenship Behavior Karyawan Ditinjau dari Persepsi Terhadap Kualitas Interaksi Atasan-bawahan dan Persepsi Terhadap Dukungan Organisasional. *Laporan Penelitian, Medan: Universitas Sumatera Utara*.
- Nur, H. (2009). Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Medtek*, 1(2). <https://doi.org/10.26858/publikan.v6i3.2275>
- Oktavianti, S., Dacholfany, M. I., & Sutanto, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Perilaku Kewarganegaraan Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMP Se-Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro*, 4(2), 58–71.
- Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2005). *Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences*. Sage Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Pidarta, M. (1992). *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. *Journal of Management*, 26(3), 513–563. [https://doi.org/10.1016/s0149-2063\(00\)00047-7](https://doi.org/10.1016/s0149-2063(00)00047-7)

- Purba, D. E., & Seniati, A. N. L. (2004). Pengaruh Kepribadian dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior. *HUBS Asia*, 8(3), 105–111.
- Purwanto, M. N. (2003). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fe UI.
- Sinha, J. B. P. (2009). *Culture and Organizational Behaviour*. SAGE Publications India.
- Supadi, & Listyasari, W. D. (2018). Hubungan Antara Lingkungan Kerja dan Motivasi dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Guru di SMA Negeri Se Jakarta Timur. *IMPROVEMENT: Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 5(1), 110–118. <https://doi.org/10.21009/IMPROVEMENT.051.10>
- Supardi. (2016). *Kinerja Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparlan, M. (2006). *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publising.
- Supriyatno, A., Subiyanto, & Tawil. (2016). Pengaruh Sertifikasi Pendidik, Kompetensi Guru dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMA. *Jurnal Profesi Pendidik*, 3(2), 171–181.
- Syah, M., Wardan, A. S., Rakhmat, M. F., & Muchlis. (1997). *Psikologi Pendidikan: Dengan Pendekatan Baru*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Ticoalu, L. K. (2013). Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Komitmen Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 782–790.
- Titisari, P. (2014). *Peranan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Triandani, S. (2017). Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Inti Kharisma Mandiri Riau Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 10(1), 18–25.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2012). *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wirawan, I. (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*

Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. UNS (Sebelas Maret University).

Yamin, M. (2010). *Standarisasi Kinerja Guru.* Jakarta: Gaung Persada 14.

PERAN TRADISI *BOTENG TUNGGUL* DALAM MEMPERKUAT *CIVIC CULTURE* MASYARAKAT ADAT LOMBOK

Hamdi Abdullah Hasibuan^{1*}, Ernawati Simatupang²

¹⁾²⁾ Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

* hamdihasibuan20@upi.edu

Abstract

Boteng Tunggul is one of the traditions of the East Lombok community which has unique wisdom values. This tradition is always carried out at the traditional ceremonies of the East Lombok people. In the process of implementing the Boteng Tunggul tradition, it becomes a tradition that has elements that can strengthen the civic culture in it. This research will explore the role of the boteng waiting tradition in strengthening the civic culture for the people of East Lombok. This study uses a qualitative approach to literature study methods. In this research, we will use the first data source. The data collection technique is done by using literature studies. In doing data analysis technique is done by reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of the study found the entanglement of the Boteng Tunggul tradition by strengthening the civic culture in the people of East Lombok. In the stump, boteng tradition becomes a culture that can sustain citizens in it as a form of realizing the identity of the indigenous people of Lombok. This tradition is always carried out by the people of East Lombok by instilling the values of togetherness, mutual cooperation, responsibility, and tolerance in it. As well as this has illustrated that the civic culture can be strengthened by preserving and advancing this tradition.

Keywords: *boteng tunggul, civic culture, indigenous peoples*

Abstrak

Boteng Tunggul merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Lombok Timur yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Tradisi ini senantiasa dilaksanakan pada upacara adat masyarakat Lombok timur. Dalam proses pelaksanaan tradisi Boteng Tunggul menjadi tradisi memiliki unsur yang dapat memperkuat civic culture didalamnya. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran dari tradisi Boteng Tunggu untuk menguatkan civic culture bagi masyarakat Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data pertama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan studi literatur. Dalam melakukan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan keterkaitan tradisi Boteng Tunggul dengan memperkuat civic culture pada masyarakat Lombok Timur. Pada tradisi Boteng Tunggul menjadi kebudayaan yang dapat menopang warga negara didalamnya sebagai bentuk untuk mewujudkan identitas masyarakat adat Lombok. Tradisi ini selalu dilaksanakan masyarakat Lombok Timur dengan menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab serta toleransi di dalamnya. Serta

hal ini telah menggambarkan bahwa budaya kewarganegaraan dapat diperkuat dengan tetap melestarikan dan memajukan tradisi ini.

Kata kunci: boteng tunggul, *civic culture*, masyarakat adat.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi perlahan telah menggeser perhatian warga negara khususnya generasi muda untuk peduli terhadap budaya. Fenomena ini, telah membuat kebudayaan menjadi tidak berarti untuk dilestarikan. Perlahan dan secara bertahap kebudayaan mengalami difusi. Globalisasi dan perkembangan teknologi menawarkan kebudayaan yang lebih praktis. Sehingga generasi muda lebih memilih untuk berperilaku konsumtif serta individualis. Bahkan melestarikan dan memajukan kebudayaan telah dianggap sebagai perbuatan kuno dan tidak menarik.

Senada dengan Suneki (2012, hal. 309) menyatakan bahwa persoalan mengenai globalisasi yang muncul tidak dapat dihindari oleh keberadaan kebudayaan daerah, dalam hal ini terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa, erosi nilai-nilai bangsa, terjadinya akulturasi budaya. Melestarikan dan memajukan budaya bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama untuk melestarikan kebudayaan telah termaktub didalam konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berkarakter, perlu adanya sinergitas seluruh elemen negara baik pemerintah maupun warga negara. Indonesia yang merupakan negara yang beraneka ragam suku dan budaya, tentunya perlu dimaksimalkan sebaik mungkin. Guna memperkuat keterlibatan warga negara, sekaligus peran tradisi dalam membentuk dan memperkuat kehidupan sosial serta politik bangsa. Menurut Nanggala & Maliha (2020, hal. 2) bahwa memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses berpolitik dan berdemokrasi perlu semangat dan kolektif semua pihak. Keterlibatan warga negara kunci dalam terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Tentunya keterlibatan publik tersebut ditunjukkan melalui proses sosial, politik, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut Tilaar (Panjaitan & Sundawa, 2016) menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan akan melahirkan sebuah identitas budaya yang nantinya menjadi identitas bangsa. Identitas budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan sendiri. Melalui kearifan lokal menjadi upaya untuk mempertahankan sebuah budaya dalam suatu bangsa (Prayogi & Danial, 2016). Identitas bangsa merupakan gambaran menyeluruh dari suatu bangsa. Keseluruhan nilai-nilai sosial yang diakui secara konsensus oleh masyarakat itulah yang disebut sebagai identitas bangsa.

Untuk mempertahankan identitas budaya sebagai identitas bangsa maka masyarakat pada umumnya harus mampu bersinergi demi menciptakan demokrasi politik yang sehat, kemandirian ekonomi yang menguntungkan masyarakat, mengutamakan kehidupan sosial budaya, yang sesuai dengan kearifan lokal, serta berperan aktif menjaga keutuhan bangsa terhadap segala ancaman (Saputra, 2017).

Boteng Tunggul merupakan tradisi yang harus dilestarikan sebagai identitas dari daerah Lombok Timur tepatnya di Desa Pringgasele. Dalam prosesi adat, *Boteng Tunggul* adalah kain tenun yang diikatkan pada sebuah pohon bambu petung, sehingga tampak seperti umbul-umbul. Berdasarkan data Khafid (2019) kain *Tunggul* itu dipercaya memiliki nilai sakral tinggi, sehingga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, ketika akan mengibarkan dalam suatu kegiatan adat gawe desa.

Tradisi *Boteng Tunggul* ini terakhir kali dikibarkan pada tahun 1979 silam, ketika pewaris dari kain ini menikah. Sejak saat itu, masyarakat sudah tidak pernah melihat *Tunggul* dikibarkan. *Boteng Tunggul* juga menjadi tradisi yang unik karena tradisi *Boteng Tunggul* sering digunakan pada upacara adat gawe desa. Saat kain *Tunggul* dibawa oleh pewaris kemudian diikat di pohon bambu dan *Tunggul* dikibarkan diiringi dengan seni tradisional sasak yaitu *Gendang Belek*. Selain itu, benda pusaka ini memiliki nilai magis dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Boteng Tunggul juga merupakan bentuk simbolik yang menghubungkan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sekaligus merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya telah memberikan corak warna warni di Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (Nurawang, 2019). Akan tetapi, untuk saat ini tradisi *Boteng Tunggul* pada masyarakat Lombok Timur perlahan mulai mengalami pergeseran. Keadaan ini diwarnai dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kearifan lokal. Tradisi ini sudah tidak akrab lagi bagi masyarakat dikarenakan sudah tergantikan oleh budaya asing yang lebih praktis. Begitupun dengan kain tenun *Tunggul*, sedikit dari masyarakat yang paham untuk memanfaatkannya sebagai *fashion* sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekaligus memanfaatkan kain tenun tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lombok Timur. Maka dari itu, tradisi ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Dikarenakan eksistensinya yang sangat jarang diketahui. Dan ketertarikan untuk melestarikannya sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan hal diatas, perlu sekali adanya sebuah kajian mengenai tradisi *Boteng Tunggul* sebagai identitas bagi masyarakat Lombok Timur agar tetap mempertahankan keberadaannya di tengah himpitan peradaban yang pesat. Pengembangan pelestarian budaya serta kearifan lokal dapat mengarah pada suatu bidang ilmu yang mengkaji budaya daerah yang terdapat didalam warga negara yaitu *civic culture* atau budaya kewarganegaraan (Mahardika & Darmawan, 2016)

Menurut Kymlicka (2015, hal. 114) menyatakan bahwa budaya kewarganegaraan adalah kehidupan sosial sehari-hari yang diwujudkan dalam praktik-praktik meliputi sebagian besar kegiatan manusia. Dalam kehidupan sosial saat ini, agar budaya kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari maka harus diwujudkan secara institusional baik disekolah, lembaga masyarakat maupun pemerintah. Lebih lanjut, Winataputra (2012, hal. 57) mengungkapkan bahwa *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara.

Berbicara mengenai *civic culture* adalah berbicara tentang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan etika dalam membangun peradaban. Adapun unsur dari budaya kewarganegaraan adalah "*civic virtue*" atau kebajikan/akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara (Winataputra &

Budimansyah, 2012). *Civic culture* merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi budaya kewarganegaraan dalam suatu wilayah dengan melibatkan seseorang atau lembaga yang didasarkan atas nilai-nilai pada keterlibatan masyarakat di dalamnya (Almond & Verba, 1963).

Menurut Wahab & Sapriya (2011, hal. 33) pendidikan kewarganegaraan akan membentuk warga negara yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bentuk hak dan kewajiban warga negara diluar dari pendidikan formal adalah dengan mempertahankan budaya lokal sebagai identitas dan karakter bangsa. Dalam usaha membangkitkan budaya lokal, PKn dalam usaha pembangunan berkelanjutan adalah PKn yang dapat membentuk warga negara aktif membantu pemerintah. PKn juga berfungsi membantu pemerintah menghadapi tantangan kekinian (Rachman, 2016). Pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai pendidikan karakter, etika, moral, yang didalamnya terdapat karakter gotong royong, saling menghormati, dan religius (Hendri, 2020). Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk sikap kedewasaan manusia dalam melakukan segala tindakan, keputusan kritis dalam segala hal.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan diatas. Maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana peran tradisi *Boteng Tunggul* dalam memperkuat kuat *civic culture* masyarakat adat Lombok Timur? Penelitian ini nantinya bertujuan untuk menganalisis peran tradisi *Boteng Tunggul* dalam memperkuat *civic culture* masyarakat adat Lombok Timur. Sekaligus menjadi acuan untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Literatur-literatur yang digunakan ini dijadikan sebagai sumber data utama. Adapun literatur yang digunakan seperti buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Untuk tahap selanjutnya penulis melakukan tahap validitas data. Dengan tujuan untuk menemukan data yang valid, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan data kepada pihak ketiga atau sumber data ketiga, guna meningkatkan peluang riset terhadap temuan itu menjadi lebih kredibel (Ali, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Boteng Tunggul* Bagi Masyarakat Adat Lombok Timur

Tradisi *Boteng Tunggul* dianggap sebagai cerminan perjalanan tenun masyarakat Pringgasela. Melalui tradisi ini menjadi bagian dan asal usul bahwa masyarakat pringgasela dilahirkan. *Boteng Tunggul* merupakan bagian dari upacara adat yang didalamnya sering dijadikan sebagai rangkaian pengobatan dan memanjakan sholat. Keaslian tradisi *Boteng Tunggul* merupakan identitas masyarakat Lombok dalam mengupayakan kelestarian budaya yang dimilikinya dengan cara mempertahankan nilai-

nilai seni budaya, nilai tradisional di dalamnya. Peran *Boteng Tunggul* sudah mampu memberikan kekuatan kepada masyarakat adat Lombok, untuk mempertahankan keaslian budayanya, dengan melakukan prosesi adat secara terus menerus, sebagai bukti penanaman kesadaran pentingnya tradisi *Boteng Tunggul*.

Maka hal ini sudah sejalan dengan teori kebudayaan yang ditemukan oleh Robert H Lowie yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang didapatkan dari lingkungan masyarakat. Didalamnya termuat mengenai kepercayaan, adat istiadat, norma yang berlaku serta kemampuan yang diperoleh melalui warisan masa lampau yang diturunkan melalui pendidikan formal dan non formal (Lowie, 1937).

Boteng Tunggul merupakan salah satu budaya yang selalu dipertahankan oleh masyarakat Lombok Timur dalam rangka mengupayakan dan melestarikan kerajinan tenun masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok sangat identik dengan kekhasan budaya tenunnya, oleh karena itu *Boteng Tunggul* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Lombok agar kekayaan budaya yang mereka miliki tetap lestari secara terus menerus.

Jika dilihat dari peranan tenun dalam *Boteng Tunggul*, maka peran *Boteng Tunggul* merupakan peran yang sangat penting dalam melestarikan dan memperkaya budaya masyarakat Lombok. Melalui prosesi adat yang diberikan kepercayaan logis dan spiritual didalamnya. *Boteng Tunggul* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat Lombok timur untuk mempertahankan keaslian budaya dan melestarikan budaya yang sudah berusia lebih kurang 850 tahun.

Boteng Tunggul salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam menciptakan warga negara yang mampu mempertahankan dan melestarikan budayanya. Sehingga secara tidak langsung dalam tradisi *Boteng Tunggul* ini telah memberikan nilai dan norma tertentu yaitu nilai kearifan lokal di dalamnya yang juga memberikan peran tersendiri dalam lingkungan masyarakat.

Mengingat bahwa prosesi *Boteng Tunggul* ini merupakan prosesi sakral yang tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua individu. Melainkan dilakukan oleh sekelompok besar masyarakat desa. yang terdiri dari keluarga dan organisasi tertentu, maka dalam hal ini usaha mempertahankan keaslian budaya masyarakat Lombok juga memberikan kesan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Melalui tradisi *Boteng Tunggul* sesuai dengan sila ke 3 dalam Pancasila. Maka pernyataan peneliti ini diperkuat oleh adanya teori Kearifan lokal (*local wisdom*) Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan usaha manusia untuk mempertahankan entitas yang menentukan harkat dan martabat seorang individu dan kelompoknya (Geertz, 2016).

Sehingga sesuai dengan teori Geertz diatas, kepribadian Warga negara Indonesia khususnya masyarakat Lombok merupakan suatu kesatuan yang sudah hidup dan berkembang dalam jati diri masyarakat Indonesia dan merupakan bagian dari cerminan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dalam menciptakan warga negara yang terampil dalam era global juga tidak boleh meninggalkan keaslian warga negara yang cerdas dalam mempertahankan budayanya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan tradisi budaya tertentu yang dapat memperkuat nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lombok.

Sehingga tradisi *Boteng Tunggul* dari banyaknya budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lombok. Menjadi cara yang disepakati bersama oleh masyarakat

adat untuk mempertahankan kedudukan *Boteng Tunggul* sebagai warisan dan kekayaan budaya dalam masyarakat adat Lombok. Serta menjadi cara yang dapat ditempuh untuk memperkaya dan memperkuat budaya kewarganegaraan masyarakat adat Lombok. Oleh karena itu, *Boteng Tunggul* telah mampu berperan sebagai alat untuk memperkuat budaya kewarganegaraan atau *civic culture* masyarakat Lombok, sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan Mubah yang mengatakan “masyarakat adat dan pemerintah perlu melakukan peninjauan dalam penyusunan strategi dalam mempertahankan eksistensi budayanya” (Mubah, 2011).

Kemudian, untuk terus menjalankan dan mempertahankan keaslian budaya *Boteng Tunggul*, berdasarkan hasil analisis peneliti perlu adanya dukungan dan apresiasi dari pemerintah terhadap pelestarian ini. Mengingat bahwa melestarikan budaya merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia, sehingga perlu diperkuat dengan aturan dan kesepakatan bersama untuk tetap melaksanakan, dan melestarikan tradisi *Boteng Tunggul*. Dan pemerintah bersama masyarakat adat perlu melakukan pola penyaringan budaya asing baik secara menyeluruh agar tidak memberikan pengaruh dalam pelestarian tradisi ini. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Paul S.N. tentang *parrot pattern* dan *amoeba pattern* dalam usaha melestarikan budaya (Justiani, 2009).

Selain diperlukan dukungan dan apresiasi dari pemerintah, diperlukannya juga peran sekolah sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab pelaksana pendidikan. Maka sebagai pemegang tanggung jawab dalam mencerdaskan warga negara yang memiliki karakter budaya. Guru dan sekolah dapat mengupayakan alternatif pelestarian budaya *Boteng Tunggul* melalui pembelajaran PKn khususnya, misalnya dalam pemberian tugas dan contoh tentang keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Serta mengaitkannya dengan makna persatuan dan kesatuan oleh adanya keberagaman, atau bahkan sekolah kejuruan dapat mengarahkan kemampuan peserta didik dalam mempelajari tenun. Guna meneruskan kemampuan dalam melestarikan *Boteng Tunggul*.

Dalam hal ini, sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh M Chaerul Jamal Munawir. Melakukan penelitian terhadap budaya *Boteng Tunggul* dan *nyongkolan* yang merupakan salah satu budaya masyarakat adat Lombok. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan kemampuan *kognitif* masyarakat Lombok tentang budaya *Boteng Tunggul* dan *nyongkolan* serta menjadikannya sebagai bahan ajar di sekolah (Munawir, 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah meneliti tentang budaya *Boteng Tunggul* sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Lombok untuk memperkuat kompetensi *civic cultural* masyarakat adat Lombok. Kedua penelitian ini sama sama membutuhkan kerja sama serta peran yang mendalam dari sekolah, masyarakat adat dan pemerintah dalam melestarikan budaya di wilayah Lombok.

Oleh karena itu, upaya pelestarian *Boteng Tunggul* merupakan bagian dari usaha masyarakat adat Lombok dalam melestarikan kearifan loka. Tradisi *Boteng Tunggul* telah mampu memperkuat *civic culture* masyarakat Lombok, yaitu dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *Boteng Tunggul*. Melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam prosesi adatnya. Sehingga hal ini sesuai dengan teori Almond, yang mengatakan bahwa “setiap individu atau organisasi kelompok tertentu memiliki hak dan kepentingan, untuk terlibat secara langsung dalam melestarikan budaya kewarganegaraannya”(Almond & Verba, 1963).

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Boteng Tunggul* merupakan salah satu dari adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Lombok yang masih bertahan. Tradisi ini telah mampu menyatukan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam prosesi adatnya tanpa harus membedakan status sosial dari masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *local wisdom* Geertz yang mengatakan bahwa “untuk terus mempertahankan harkat dan martabat, suatu entitas kelompok atau individu diperlukan usaha yang kompleks dan kerjasama yang baik, antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelestarian budaya tersebut”(Geertz, 2016).

Sehingga untuk memperkuat teori *local wisdom* diatas, peneliti juga sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa “kearifan lokal merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mempertahankan nilai budaya, keagamaan, dan kebiasaan lingkungan masyarakatnya (Ratih & Suryana, 2020). Oleh karena itu menurut analisis penulis bahwa *Boteng Tunggul* telah menjadi salah satu budaya yang mampu bertahan dengan eksistensinya dalam menjaga keaslian tradisinya di tengah hiruk pikuk pengaruh globalisasi. Serta membawa dampak dalam pelestarian adat ini, namun *Boteng Tunggul* telah mampu bertahan dengan kekuatannya bersama dengan masyarakat adat untuk terus melaksanakan adat ini (Nahak, 2019).

Keterlibatan Berbagai Pihak Dalam Melestarikan Tradisi *Boteng Tunggul*

Upaya memperkuat *civic culture* masyarakat adat Lombok Timur, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersumber pada pengetahuan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Lombok. Melalui pelaksanaan tradisi *Boteng Tunggul* dan kerjasama yang baik dengan masyarakat adat, sekolah dan generasi muda. Apabila pengetahuan tentang keberadaan budayanya sudah diberikan. Maka masyarakat adat dan generasi muda, sudah mampu memposisikan diri dengan tidak menjadikan dirinya sebagai bangsa yang tertinggal oleh peradaban, tetapi bangsa yang maju oleh kekayaan budayanya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa dengan menjaga eksistensi dan nilai kebudayaan yang dapat hidup berdampingan, dengan kehidupan yang modern merupakan keberhasilan daerah, dalam mempertahankan nilai tradisi suatu daerahnya (Hidayat, 2019).

Civic culture merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam lingkungan yang memiliki aspek kebudayaan dan tradisi, yang didalamnya terdapat nilai dan norma yang disepakati bersama dalam lingkungan budaya tersebut (Mahardika & Darmawan, 2016). Kemudian menjadi aspek yang dihayati dan dilestarikan masyarakat dalam lingkungan hidupnya, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tersebut untuk terus melestarikannya dari generasi ke generasi. Warga negara yang cerdas ialah warga negara yang terampil, memiliki kemampuan dalam melestarikan serta memiliki kesadaran dalam menjaga dan mempertahankannya budayanya.

Melestarikan kebudayaan sudah menjadi kewajiban untuk semua pihak dalam melaksanakannya. Keterlibatan warga negara juga memiliki peranan tersendiri. Warga negara sebagai subjek yang berada di tengah masyarakat dapat memberikan dampak untuk mempromosikan tradisi daerah untuk kembali diperkenalkan kepada generasi muda untuk dapat diwariskan. Untuk pemerintah pusat dapat melakukan sinergitas kepada pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dan kebudayaan dalam mewujudkan pembangunan nasional di bidang kebudayaan sebagai upaya mewujudkannya negara

demokratis yang berkebudayaan. Serta dengan upaya sinergitas tersebut dapat mengembangkan budaya lokal pada domain yang lebih luas lagi.

Menurut Jenks (2017, hal. 80) menyatakan bahwa pendekatan kita terhadap budaya dengan pertama-tama perhatian terhadap betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran. Yang menegaskan bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Dengan demikian akan menunjukkan betapa penting kesadaran untuk menumbuhkembangkan budaya. Dari hal ini, untuk membangun kesadaran tidak hanya bertengger pada pengetahuan saja. Akan tetapi butuh dari dalam nurani hingga kesadaran warga negara tumbuh untuk kembali menguatkan budaya lokal yang hampir punah. Makna kebudayaan terbentuk karena status quo dalam sebuah masyarakat. Generasi muda tidak hanya dapat didekati dan dipahami sebagai sasaran nilai namun mereka adalah pembentuk nilai-nilai yang baru. Mereka adalah aktor yang mewarnai dan mendefinisikan budaya dalam ruang yang plural sekaligus multikultural (Anissa, 2015).

Adanya tradisi *Boteng Tunggul* dapat memperkuat nilai-nilai *civic culture* pada setiap warga negara. Tradisi *Boteng Tunggul* merupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Lombok Timur sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan, kepada masyarakat dan generasi muda untuk dijaga, dilestarikan serta dimajukan agar tradisi tersebut tetap ada. Nilai-nilai budaya pada tradisi *Boteng Tunggul* tentu terdapat nilai-nilai luhur didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari makna dalam setiap kegiatan adat atau upacara-upacara adat yang dilaksanakan pada tradisi tersebut.

Menurut Abdullah (2015, hal. 41) menyatakan bahwa budaya daerah telah memberi kerangka kultural dan memberikan definisi ukuran nilai bagi kehidupan sekelompok orang. Lebih lanjut, budaya daerah menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial sehingga mengharuskan masyarakat untuk melakukan adaptasi dengan situasi dan perkembangan zaman. Artinya bahwa peran tradisis *Boteng Tunggul* penting bagi keberlangsungan masyarakat adat Lombok Timur. Masyarakat adat Lombok Timur juga menjadikan penggunaan kain tenun *Tunggul* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diyakini dapat menjaga eksistensi dari kain tenun *Tunggul* tersebut. Pada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kain tenun *Tunggul* sudah tidak asing lagi. Karena kain tenun tersebut selalu digunakan tidak hanya pada acara-acara adat saja melainkan di kehidupan sehari-hari.

Secara tidak langsung, pelaksanaan tradisi *Boteng Tunggul* telah mencerminkan nilai-nilai budaya kewarganegaraan atau *civic culture*. Hanya saja, upaya meningkatkan nilai-nilai tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak untuk dapat terealisasi. Untuk menjadikan budaya sebagai wahana keseharian merupakan tanggung jawab para pemilik budaya tersebut. Seperti masyarakat adat, sekolah, generasi muda, dan teknologi. Kesemuanya harus benar-benar memiliki keterlibatan terhadap tradisi ini, sehingga peran tradisi *Boteng Tunggul* dapat memperkuat nilai-nilai *civic culture*. Adapun keterlibatan yang dapat diberikan kepada tradisi *Boteng Tunggul* dalam memperkuat *civic culture* sebagai berikut:

1. Keterlibatan Masyarakat Adat

Masyarakat adat secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam usaha pemerintah dalam melestarikan budaya *boteng tunggul*. Mengingat bahwa tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat Lombok Timur dari generasi ke generasi. Peran yang melekat pada faktor konsisten yang

diperankan oleh masyarakat adat akan membawa pengaruh yang baik dalam kelangsungan usaha dalam melestarikan budaya *boteng tunggul*.

Masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu tatanan kehidupan yang memiliki kekhasan dalam penerapan aktivitas hidupnya. Maka senada dengan Widyanti (2015, hal. 160), Masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai kebudayaan daerahnya dikenal dengan sebutan kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal masih bertahan di tengah-tengah kemajuan zaman yang menghendaki mobilisasi yang serba cepat dan instan serta berupaya menurunkan budaya yang dimilikinya dari generasi ke generasi. Kemudian budaya tersebut tidak dianggap sebagai atau berarti kuno atau terbelakang. Mengingat apa yang tetap dipertahankan tersebut tetap memiliki alasan yang dianggap masuk akal.

Masyarakat adat yang tetap memegang teguh kebudayaan dan tradisi yang dimilikinya tidak selalu bersifat tertutup. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa mereka dapat secara terbuka menerima komunitas lain seperti pariwisata lokal maupun internasional. Dengan bangga mereka memperkenalkan kekayaan budaya yang dimilikinya, sifat kuat mempertahankan tradisi oleh masyarakat adat Lombok Timur tidak membatasi mereka untuk bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu budaya dan tradisi dapat tergoyahkan keaslian tradisinya, namun masyarakat adat Lombok sudah mampu mempertahankan nilai-nilai budayanya dari sejak jaman nenek moyang sampai sekarang ini (Suparno, Geri Alfikar, Santi, & Yosi, 2018).

2. Keterlibatan Sekolah

Sekolah memiliki keterlibatan untuk mendukung eksistensi tradisi *Boteng Tunggul*. Sekolah juga dapat menjadi wahana untuk pengembangan karakter. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan model pembelajaran berbasis budaya. Agar budaya tetap tumbuh pada setiap peserta didik dan generasi muda. Menurut Komalasari & Saripudin (2017, hal. 179) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bahan dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu, belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya.

Belajar tentang budaya, menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam satu mata pelajaran tentang budaya. Belajar dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan sebagai cara atau metode untuk dipelajari. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar. Belajar melalui budaya mengarahkan untuk memperhatikan kedalaman pemikirannya, penjiwaannya terhadap konsep serta imajinasi kreasinya dalam mengekspresikan pemahamannya (Komalasari & Saripudin, 2017).

Menjaga dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan tugas bersama sebagai warga negara Indonesia, dan hal ini dapat diupayakan dalam dua cara yaitu keterlibatan langsung dalam budaya tersebut dan pengetahuan kewarganegaraan, hal ini seiring dengan pendapatnya (Sendjaja, 2013) yang mengatakan bahwa usaha untuk mempertahankan budaya lokal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *culture experience* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara langsung seperti terlibat dalam upacara adat, tarian dan lain sebagainya, yang kedua ialah *culture knowledge* yaitu membuat pusat informasi mengenai fungsi

dan keberadaan budaya tersebut, serta memberikan edukasi yang baik kepada generasi ke generasi.

Keterlibatan sekolah memiliki peranan penting untuk memelihara budaya lokal. Dengan adanya pembelajaran yang mengarahkan pada basis budaya maka akan dengan mudah untuk melestarikannya. Keterkaitan antara warga negara dan budaya maka porsi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mengedepankan unsur budaya lokal. Sehingga akan membangun warga negara yang baik sadar dan peduli terhadap budaya lokalnya. Dengan demikian diharapkan muncul karakter yang mengedepankan sikap gotong royong, toleransi, peduli, dan tanggung jawab.

3. Keterlibatan Generasi Muda

Pada dasarnya tradisi *Boteng Tunggul* mampu membuat keterlibatan generasi muda. Akan tetapi belum mampu secara langsung membuat generasi muda sebagai pemern utamanya. Sempitnya ruang yang diberikan untuk pembelajaran budaya secara langsung mejadi sebab utama memudarnya budaya lokal pada generasi muda. Keterlibatan generasi muda pada tradisi ini terfokus pada peran yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi *Boteng Tunggul*.

Melalui peran generasi muda diharapkan mampu mendorong para pemuda untuk meningkatkan kecintaannya terhadap budaya lokal (Saputra, 2017). Pelestarian tradisi *Boteng Tunggul* dapat terjadi jika keterlibatan aktif generasi muda yang bergerak untuk memajukan kebudayaannya sendiri. Generasi muda melalui organisasi kepemudaan sangat penting keterlibatannya, dikarenakan organisasi kepemudaan menjadi wadah para generasi muda berhimpun. Dalam realitasnya generasi muda melalui organisasi kepemudaan dapat mendorong generasi muda untuk menciptakan kehidupan sosial budaya yang sesuai dengan kearifan lokal.

Pendayagunaan keterlibatan generasi muda dalam melestarikan tradisi *Boteng Tunggul* dalam dilaksanakan dengan memberdayakan organisasi kepemudaan setempat. Peran generasi muda dapat dilakukan secara optimal dengan melakukan kegiatan-kegiatan budaya secara terstruktur dan sistematis. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi cara untuk melestarikan tradisi *Boteng Tunggul* ini. Rasa kepemilikan telah tumbuh pada generasi muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini. Kemudian generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memajukan tradisi ini. Perkembangan zaman tentu harus disikapi dengan baik sehingga bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain khususnya generasi muda Lombok Timur. Upaya memanfaatkan kecanggihan teknologi dapat dilakukan dengan cara mengabadikan tradisi-tradisi ini kedalam situs budaya.

4. Pemanfaatan Teknologi

Memanfaatkan teknologi juga menjadi bagian dalam upaya pelestarian budaya lokal. Pancasila merupakan acuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Fadilah, 2019). Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari, namun komitmen sebuah bangsa dalam menyikapinya yang perlu dilakukan. Teknologi telah berkembang dari zaman ke zaman. Perkembangan teknologi saat ini berkembang begitu pesat, maka teknologi menjadi strategi lain dalam melestarikan budaya lokal.

Untuk memajukan kebudayaan lokal dapat memanfaatkan teknologi di berbagai media atau platform. Penggunaan media sosial dan media *online* merupakan *output* dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, serta menjadi sarana strategis dalam mempromosikan budaya lokal, selain efisiensi juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia (Nanggala & Malihah, 2020). Pada praktiknya, masyarakat dan generasi muda berkolaborasi untuk mempromosikan tradisi *Boteng Tunggul*. Perkembangan teknologi ini memiliki sisi positif bagi pengembangan dan kemajuan budaya lokal. Hal ini ditandai dengan mudahnya mengakses berbagai platform untuk publikasi di media sosial.

Perkembangan teknologi harus benar-benar dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan pemajuan kebudayaan. Penggunaan media sangat bermanfaat untuk menyimpan data mengenai tradisi lokal sebagai upaya menjaga keutuhan informasi bagi generasi muda selanjutnya. Perlunya menjaga serta mewarisi informasi kebudayaan sebagai sarana memberikan edukasi serta menggerakkan hati masyarakat agar berkenan melestarikan kebudayaan yang dimaksudkan (Priatna, 2017).

Tantangan Memperkuat *Civic Culture* Melalui Tradisi *Boteng Tunggul*

Masalah pelestarian tradisi di tengah perubahan zaman yang begitu signifikan tidaklah mudah. Perubahan yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya perubahan pada sektor kebudayaan. Masalah pelestarian dan perubahan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Artinya bahwa kebudayaan apapun mau tidak mau pasti akan mengalami perubahan dari keadaan aslinya. Hal ini biasanya dipicu oleh munculnya perkembangan zaman yang menghampiri dengan perubahan atau unsur dinamis didalamnya (Prayogi & Danial, 2016). Maka tantangan inilah yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokalnya.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Lombok dalam mempertahankan tradisi budaya *Boteng Tunggul* ialah kondisi kemajuan budaya yang berkaitan dengan globalisasi. Dapat memberikan pengaruh dan kegoyahan dalam pelestarian budaya *Boteng Tunggul*. Dewasa ini, tentu saja sasaran utamanya adalah generasi muda yang didalam dirinya dan kehidupan sehari-harinya sudah memudar budaya kewarganegaraan atau *civic culture*. Tantangan ini menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan tradisi *Boteng Tunggul* karena akan mempengaruhi minat dalam prosesi pelaksanaan adat *Boteng Tunggul*. Teori Geertz mengatakan bahwa “kekuatan kearifan lokal yang melekat pada diri individu atau kelompok, adalah ditentukan oleh bagaimana usaha individu atau kelompok tersebut menjaga eksistensi budaya yang dimilikinya, agar terjaga harkat dan martabat entitas dirinya” (Geertz, 2016).

Kemudian tantangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini ialah implementasi pelestarian tradisi *Boteng Tunggul*. Di sekolah, belum mampu diterapkan dengan baik dalam lingkungan sehari-hari, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperkuat *civic culture* dalam masyarakat Lombok. Oleh karena itu Tylor mengatakan bahwa “agar warga negara memiliki budaya kewarganegaraan yang kompleks di dalamnya harus termuat pengetahuan dan keilmuan serta mampu melestarikan dalam kehidupan sehari-hari (Tylor, 2018). Dan hal ini sejalan dengan pendapatnya Almond dan Ferdinand dalam teorinya yang menyatakan bahwa “untuk memperkuat *civic culture* nya, suatu individu perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung untuk terciptanya warga negara yang berbudaya” (Almond, Gabriel & Verba, 2017).

Pendidikan harus menyentuh wahana sosio-kultural salah satunya dengan memanfaatkan pendidikan berbasis kearifan lokal. Membangun pendidikan yang berbasis kearifan lokal mengandung nilai yang relevan dan berguna untuk pendidikan, serta dapat dilakukan dengan cara merevitalisasi budaya lokal (Tamura, 2018). Jalur pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk membaangun karakter bangsa berbasis pada budaya lokal. Penanaman karakter tidak akan berhasil jika hanya dengan transfer ilmu saja, butuh keteladanan untuk membentuk karakter yang melibatkan semua unsur pendidikan. Serta andil dan partisipasi dari semua *stakeholder* pendidikan untuk memberikan kontribusi nyata akan pelestarian budaya lokal.

Pendidikan yang berbasis pada budaya lokal akan mempersiapkan generasi muda agar lebih siap dalam menghadapi perubahan zaman. Pendidikan berbasis pada budaya lokal akan lebih mudah diterima di masyarakat dengan budaya sebagai pilar pendidikan. Sehingga karakter yang diharapkan akan muncul dan tertanam dengan baik. Dengan demikian, seluruh elemen pendidikan turut andil sebagai pelaku budaya lokal dalam menginternalisasikan nilai-nilai budaya daerah untuk membentuk suatu model pendidikan karakter yang khas bagi setiap daerah. Selanjutnya, jika dilihat era globalisasi dalam kemajuan yang sangat pesat akan merubah pola pikir dan cara hidup masyarakat. Terus-menerus akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan jaman. Sehingga akan berkembang pemikiran bahwa pelaksanaan tradisi adat merupakan sesuatu yang bersifat kolot dan tidak modernisasi. Maka pola pikir dan cara hidup tersebut dapat menggeserkan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga kebanyakan warga negara atau generasi muda enggan untuk berpartisipasi langsung dalam urusan kebudayaan daerah setempat.

Tantangan lain dalam meningkatkan *civic culture* melalui tradisi *Boteng Tunggul* Salah satunya adalah dengan mendayagunakan kain tenun *Tunggul* sebagai bentuk *fashion* sesuai dengan kebutuhan zaman. Lemahnya masyarakat dalam memanfaatkan keadaan zaman untuk memajukan kearifan lokal menjadi penghambat kearifan lokal itu untuk maju dan berkembang. Jika kain tenun *Tunggul* dapat diberdayakan untuk kemajuan zaman, Hal ini tentu akan menyadarkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam upaya melestarikan tradisinya. Dengan demikian, jika tradisi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman, maka secara tidak langsung akan membangkitkan gairah putra-putra daerah untuk terus mempromosikan tradisinya. Dengan begitu, tradisi ini akan dikenal sampai ke generasi berikutnya.

Mengingat masyarakat Lombok Timur masih ada yang berprofesi sebagai penenun Kain *Tunggul*. Kain tenun *Tunggul* masih menjadi ciri khas bagi masyarakat Lombok. Kain tenun ini memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tidak bisa lepas dari tradisi *Boteng Tunggul*. Menjadi sebuah kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. Secara tidak langsung dalam prosesi adat *Boteng Tunggul* masyarakat adat Lombok Timur telah mengajarkan nilai-nilai *civic culture*.

Menurut analisis peneliti bahwa indikator *civic culture* ialah jika manusia mampu berpartisipasi secara langsung dalam urusan di lingkungan sekitarnya. Menurut Geertz dalam bukunya *interpretation culture* bahwa suatu kebudayaan itu dipandang dengan suatu pendekatan bersifat teks yang mengarahkan pada konsep kebudayaan yang simbolik. Serta kebudayaan tersebut dapat dibaca, ditranslasikan serta mampu diimplementasikan dengan baik dalam lingkungannya (Geertz, 2016)

Kemudian hasil penelitian dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa peran *Boteng Tunggul* telah mampu menjawab tantangan-tantangan di atas, dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh elemen atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pelestarian tradisi *Boteng Tunggul*. Tradisi ini dianggap telah mampu melalui tantangan tersebut dengan memperkuat *civic culture* masyarakat Lombok melalui kerjasama pihak sekolah, kelompok masyarakat adat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Syahbani tentang Implementasi budaya. Dalam menumbuhkan sikap afektif pada budaya *begibung* di Lombok.

Hasil penelitian oleh Ali Syahbani menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan sikap afektif pada budaya *begibung* pada masyarakat Lombok perlu adanya jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat adat dengan sekolah seperti menjadikan bahan ajar di sekolah kemudian tidak lupa dukungan dari pemerintahan setempat agar budaya ini tetap terlaksana sampai generasi berikutnya. Maka sesuai dengan teori Almond tentang *civic culture* yang mengatakan bahwa untuk mempertahankan eksistensi budaya kewarganegaraan suatu daerah perlu adanya usaha atau tindakan seseorang dan lembaga yang didasarkan atas nilai-nilai yang menekankan pada keterlibatan masyarakat (Almond, Gabriel & Verba, 2017).

Tradisi *Boteng Tunggul* dalam Memperkuat *Civic Culture*

Kearifan lokal butuh untuk terus menerus diwariskan, maka sangat diperlukan sekali peranan masyarakat dan lembaga adat, untuk memberikan pembelajaran kepada generasi muda untuk sadar terhadap adat istiadat (Nurdin, 2013). Kebudayaan lokal untuk menjaga agar tidak termakan oleh zaman dan tergantikan oleh budaya asing. Dengan adanya budaya lokal yang mampu menopang kehidupan warga daerah sekaligus telah membentuk identitas warganya. Maka budaya kewarganegaraan telah tumbuh didalamnya (Malatuny & Ritiauw, 2018).

Menurut Denny (dalam Islamuddin 2016, hal. 58) menyatakan bahwa *civic culture* digunakan sebagai label untuk merangkum sebagai nilai dan perilaku yang memperkokoh institusi demokrasi. Elemen *civic culture* antara lain, penghormatan atas kultur, kemampuan bekerja sama, dan sikap saling percaya dalam interaksi sosial. Dalam konteks *civic culture*, melestarikan budaya itu ditandai dengan adanya sikap warga negara untuk tetap saling percaya, bekerja sama, tanggung jawab dan gotong royong (Mauludea, Nurhadianto, & Islamuddin, 2016).

Dalam tradisi *Boteng Tunggul*, prosesi adat yang diberikan memiliki kepercayaan logis dan spiritual didalamnya. Pada pelaksanaannya, tradisi ini dijalankan secara bersama-sama dan saling mempercayai satu sama lain. *Boteng Tunggul* juga merupakan bentuk simbolik yang menghubungkan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa sekaligus merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya telah memberikan corak warna warni di Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. *Boteng Tunggul* merupakan bagian dari upacara adat yang di dalamnya sering dijadikan sebagai rangkaian pengobatan dan memanjatkan sholawat.

Dalam konteks *civic culture*, tradisi *Boteng Tunggul* pada masyarakat adat Lombok Timur memiliki nilai-nilai yang ditandai dengan munculnya karakter warga negara untuk menghargai budaya dengan tetap mempertahankannya, munculnya nilai religius, gotong royong, dan tanggung jawab. Dalam *civic culture* (budaya kewarganegaraan) akan mengarahkan budaya untuk disikapi oleh warga negara dengan memunculkan sikap untuk

saling menghargai, tanggung jawab, kebersamaan, untuk mengembangkannya nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas (Feriandi, 2017).

Karakter itu muncul seiring dengan kuatnya tradisi *Boteng Tunggul* di masyarakat adat untuk tetap ada ditengah-tengah kehidupan mereka. Tradisi *Boteng Tunggul* telah membangun karakter religius, gotong royong dan tanggung jawab di masyarakat. Serta memunculkan nilai-nilai kebersamaan dan komitmen yang kuat bagi masyarakat Lombok Timur. Hal ini tentu akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan budaya kewarganegaraan atau *civic culture*. *Boteng Tunggul* sudah menjadi identitas pada masyarakat Lombok Timur maka melestarikan tradisi ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Lombok Timur. Dalam upaya meningkatkan *civic culture* masyarakat dapat membentuk tradisi dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak luntur termakan waktu. Seluruh masyarakat dapat bekerjasama demi menghidupkan kembali tradisi ini. Keterkaitan antara tradisi *Boteng Tunggul* dengan nilai-nilai *civic culture* memiliki arsirannya.

Apabila berkaca pada teori *civic culture*, tradisi ini telah menopang kehidupan masyarakat Lombok Timur sehingga mampu membentuk identitas warganya. Disisi lain ketika tradisi ini dilaksanakan maka akan terlihat sisi Ke-Indonesia-an yang hidup. Kehidupan berbangsa dan bernegara terjalin kental dan harmonis dalam pelaksanaan tradisi ini. Terjaganya tradisi *Boteng Tunggul* diperlukan agar tujuan dari nilai-nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat tidak hilang. Tradisi *Boteng Tunggul* telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang sama dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Menurut Winatapura & Budimansyah (2012, hal. 62) bahwa unsur dari budaya kewarganegaraan adalah *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan. Yang didalamnya mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya, dan toleran, kehidupan yang kooperatif, serta semangat kemasyarakatan. Tradisi *Boteng Tunggul* kaitannya dengan memperkuat *civic culture* telah membangun kesadaran warga negara untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya lokal yang hampir punah. Pemahaman ini akan membentuk warga negara yang baik serta mencerminkan nilai-nilai *civic culture*.

Peran tradisi *Boteng Tunggul* dapat menjadikan masyarakat Lombok Timur sebagai warga negara yang baik dan mencerminkan nilai-nilai *civic culture*, serta memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola budaya lokal. Budaya lokal dapat juga dijadikan sarana pengembangan kepribadian masyarakat Lombok Timur untuk menjunjung tinggi budaya ketimuran serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan budaya kewarganegaraan bagi masyarakat Lombok Timur.

Penelitian ini memberikan sisi lain dalam budaya lokal dan nilai-nilai *civic culture*. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan bahwa ada keterkaitan antara tradisi *Boteng Tunggul* dengan nilai *civic culture*. Dalam hal ini, tradisi *Boteng Tunggul* mampu memberikan peran signifikan dalam memperkuat nilai-nilai *civic culture* pada masyarakat adat Lombok Timur. Dengan demikian, konsepsi tersebut telah menginternalisasikan *civic culture* ke dalam tradisi *Boteng Tunggul*.

Melalui penelitian ini dapat mentransformasikan nilai *civic culture* dalam tradisi *Boteng Tunggul*. Selanjutnya memberikan kontribusi nilai *civic culture* dalam tradisi *Boteng Tunggul* untuk memperkuat nilai *civic culture* masyarakat adat Lombok.

Penelitian ini juga menyajikan konsep *civic culture* dalam tradisi *Boteng Tunggul* sekaligus menjadi sarana untuk memperdalam dan memperluas nilai *civic culture* dalam tradisi *Boteng Tunggul* dan memperkuat budaya kewarganegaraan masyarakat adat Lombok.

SIMPULAN

Tradisi *Boteng Tunggul* pada masyarakat Lombok Timur memiliki nilai kebersamaan, nilai gotong royong, toleran yang secara kooperatif menguatkan *civic culture* di masyarakat Lombok Timur. Peran serta seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga adat. Sinergitas perlu dilakukan guna melestarikan tradisi upacara adat *Boteng Tunggul*, agar terjaga keaslian dari nilai-nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi adat *Boteng Tunggul*. Dampak yang dapat diberikan dari penelitian ini. Pertama, akan memberikan dampak terhadap pendidikan kewarganegaraan di masyarakat untuk memajukan dan melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kedua, memberikan dampak terhadap mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan untuk memasukkan unsur budaya lokal sebagai materi pokok yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik. Agar kearifan lokal itu tetap terjaga selamanya.

Dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak untuk menguatkan kembali sektor kebudayaan sebagai upaya memajukan tradisi yang hampir hilang. Dalam upaya melestarikan tradisi ini, keluarga, masyarakat serta pemerintah melakukan kerjasama dalam menanamkan pengetahuan urgensi pelestarian tradisi adat kepada masyarakat khususnya kepada generasi-generasi muda, keluarga dapat mengambil peran utama dengan memberikan pengetahuan melalui pendidikan budaya dalam lingkungan keluarga, kemudian sekolah dapat menjalankan misinya sebagai pelaku utama dalam pendidikan dengan merangkaikan pembelajaran yang bernuansa pelestarian budaya mengenai tradisi ini, kemudian pemerintah dan masyarakat adat dapat bersama-sama mempertahankan keaslian tradisi *Boteng Tunggul* dengan terus melakukannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur sedalam-dalamnya kami haturkan kepada sang pemilik alam semesta yaitu Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang telah memberikan kepada hambaNya kepuasan nikmat tiada batas. Dan tempat kembali bagi seluruh insan yang merindukannya. Tak lupa pula, salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, fenomena alam yang tampak sempurna, semoga kita termasuk kedalam golongan umatnya di akhir zaman kelak. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga berkat bantuan berbagai pihak, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik pemerintah, akademisi, generasi muda serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ali, M. (2014). *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitude and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown and Company.
- Anissa, F. (2015). Civic of Culture: Media, Kaum Muda, dan Mengenali Ke-Istimewaan Yogyakarta. *Komunikator*, 7(1), 1–18.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 2(02), 66–78. <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>
- Feriandi, Y. A. (2017). Revitalisasi Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan Jawa Sebagai Sumber Pembentukan Civic Culture dan Politic Culture. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 176–182. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15323>
- Geertz, C. (2016). *Islam Observed Religious Development in Marocco and Indonesia*. United States of America: Phoenix Editio.
- Hendri. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Hidayat, O. T. (2019). Pembinaan Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sunda. *SOSIETAS*, 9(1).
- Jenks, C. (2017). *Culture: Studi Kebudayaan* (E. Setyawati, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Justiani. (2009). *Globalisasi dan Nasionalisme Indonesia*. Surabaya: Surabaya Post.
- Khafid, S. (2019). Boteng Tunggul, Tradisi Ratusan Abad dari Desa Pringgasela. Diambil 10 Januari 2021, dari travel.tempo.co website: <https://travel.tempo.co/read/1249114/boteng-tunggul-tradisi-ratusan-abad-dari-desa-pringgasela/full&view=ok>
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). *Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasi Living Value Education*. Bandung: Refika Aditama.
- Kymlicka, W. (2015). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Lowie, R. H. (1937). *The History of Ethnological Theory*. New York: Rinehart & Company. Inc.
- Mahardika, I. W. T., & Darmawan, C. (2016). Civic Culture dalam Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. *Humanika*, 23(1), 20–31. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.20-31>
- Malatuny, Y. G., & Ritiauw, S. P. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 5(2), 35–46. <https://doi.org/10.15408/sd.v5i2.10554>
- Mauludea, H., Nurhadianto, & Islamuddin. (2016). Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic Culture. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 53–68. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v14i1.285>

- Mubah, A. S. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302–308.
- Munawir, M. C. J. (2020). Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan. *Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta*, 18(1), 42-50. <https://doi.org/10.21831/imaji.v18i1.31643>
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nanggala, A., & Malihah, E. (2020). Peran Tradisi Irung-Irung dalam Memperkuat Civic Engagement Generasi Muda di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p1-16>
- Nurawang, R. (2019). Tradisi Tenun Boteng Tunggul Masyarakat Lombok Timur. Diambil 11 Januari 2021, dari daerah.sindonews.com website: <https://daerah.sindonews.com/berita/1439489/29/tradisi-tenun-boteng-tunggul-masyarakat-lombok-timur?showpage=all>
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135–154. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.645>
- Panjaitan, L. M., & Sundawa, D. (2016). Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1481>
- Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79>
- Priatna, Y. (2017). Melek Informasi Sebagai Kunci Keberhasilan Pelestarian Budaya Lokal. *Publication Library and Information Science*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.24269/pls.v1i2.720>
- Rachman, F. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Tantangan Ketegangan. In B. Mulyono, M. Murdiono, Halili, I. Arpanudin, & Suyato (Ed.), *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-2: Penguatan Kajian Atas Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non-Kependidikan* (hal. 209–236). Yogyakarta: Laboratorium PKn FIS UNY.
- Ratih, D., & Suryana, A. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Leuweung Gede Kampung Kuta Ciamis dalam Mengembangkan Green Behavior Untuk Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Jurnal Artefak*, 7(2), 141–152. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.4199>
- Saputra, I. (2017). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara di Kalangan Pemuda Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 1(1), 33–41.
- Sendjaja, S. D. (2013). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah Civicus*, II(1), 307–321. <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i1.88>
- Suparno, Geri Alfikar, Santi, D., & Yosi, V. (2018). Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal Nusantara Ditengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Gawai Dayak Sintang. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.31932/jpk.v3i1.144>
- Tamura, H. (2018). Penerapan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri 8 Rambutan Kabupaten Banyuasin Menuju Global Citizen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Tylor, E. B. (2018). *Primitive Culture; Part 1: The Origins of Culture*. London: Murray.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Widyanti, T. (2015). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 157–162. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.

PEMAHAMAN DAN PEMBINAAN NORMA SOPAN SANTUN MELALUI PPKN PADA ANAK SEKOLAH GBI SUKMA MEDAN

Rizky Agassy Sihombing^{1*}, Jennie Febrina Hutagalung², Pristi Suhendro
Lukitoyo³

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*rizkyagassy@mhs.unimed.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the understanding and guidance that is suitable to be implemented in the norms of courtesy through Civics learning in Sunday school children at GBI Sukma Medan. The research method used is a descriptive qualitative method, data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. The object of this research is the activity of fostering norms of courtesy in Civics learning through storytelling techniques. The study population was all children of the Sunday school at GBI Sukma Medan, which consisted of class III-VI. The data collection instrument is the researcher himself with the help of observation guidelines and interview guidelines. The results obtained from the data analysis found that Sunday school children at GBI Sukma Medan did not understand the concept of the norms of courtesy and the application of the norm values of courtesy in daily life through Civics learning that they had previously learned.

Keywords: PPKn, guidance, understanding, norms, courtesy.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pembinaan yang cocok dilaksanakan dalam norma sopan santun melalui pembelajaran PPKn pada setiap anak sekolah minggu GBI Sukma Medan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi secara menyeluruh. Objek dalam penelitian ini adalah kegiatan pembinaan terhadap norma sopan santun dalam pembelajaran PPKn dengan teknik bercerita. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh anak-anak sekolah minggu GBI Sukma Medan yang dimana terdiri dari kelas III-VI. Instrumen dalam pengumpulan data dengan cara peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi serta pedoman wawancara. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis data yang ditemukan, menyatakan bahwa anak-anak sekolah minggu GBI Sukma Medan kurang memahami mengenai konsep norma sopan santun serta dalam penerapan nilai norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran PPKn yang telah mereka pelajari sebelumnya.

Kata kunci: PPKn, pembinaan, pemahaman, norma, sopan santun

PENDAHULUAN

Pembelajaran dilakukan dan didesain untuk membelajarkan para siswa, artinya para siswa berperan menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran akan lebih mengarah pada aktivitas siswa untuk dapat memperoleh hasil belajar (Widodo & Widayanti, 2013). Namun, menurut Sari & Supardi (2013) guru kerap menggunakan model pembelajaran konvensional yang cenderung membuat siswa bersikap pasif karena siswa hanya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan seringkali siswa tidak sepenuhnya berkonsentrasi pada proses pembelajaran. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan dilaksanakan aktivitas pembelajaran. Sekolah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional wajib melaksanakan peraturan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya UU Sisdiknas) yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), berfungsi memberikan bekal dasar, pengembangan kemampuan pikir, keterampilan, dan karakter peserta didik untuk kehidupan masa depannya. Baik kehidupan pribadi maupun masyarakatnya.

Jika kita lihat tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU Sisdiknas berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional tersebut telah jelas bahwa pendidikan karakter sudah merupakan bagian dari proses pendidikan kita. Namun kenyataannya, pendidikan karakter masih belum dilakukan selaras dengan pendidikan di sekolah.

Diperlukan tanggungjawab bersama antara sekolah dan orang tua untuk dapat mencapai pendidikan pada anak. Orangtua tidak dapat sepenuhnya membebaskan proses pendidikan pada anak mereka di sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hubungan yang baik antara sekolah dan orangtua dalam mendidik anak sehingga terbentuklah pendidikan karakter yang kuat pada anak. Pada hakikatnya tanggungjawab pendidikan merupakan tanggung jawab besar dan penting karena pada tatanan operasionalnya, pendidikan merupakan bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa, selain itu pendidikan juga merupakan bagian dari proses pendewasaan rohaniah dan jasmaniah (Salahudin, 2011).

Kondisi di Indonesia di beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya penurunan karakter pada generasi muda, terlebih lagi terhadap anak-anak dibawah umur. Pada 2017, terlihat data yang menunjukkan jumlah anak yang menjadi tahanan atau narapidana yang ada di seluruh Indonesia mencapai 3.479 anak. Sebanyak 1.010 anak atau sama dengan 29 persen masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.469 anak atau sama dengan 71 persen telah berstatus narapidana atau anak didik. Pada tahun 2017, baik tahanan maupun narapidana anak mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2016. Sebagian tahanan dan narapidana anak merupakan laki-laki sama dengan 97,84 persen (KEMENPPPA, 2018). Beberapa kasus lain diantaranya seperti adanya kasus bully terhadap anak lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, terlebih lagi terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, mencoba menonton pornografi karena tidak adanya

pengawasan terhadap anak dibawah umur, lebih banyak bermain game online, dibanding dengan belajar atau membantu orang tua. Anak-anak dibawah umur zaman sekarang pun, terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak diantara mereka yang mencoba-coba untuk ikut kegiatan tawuran dan juga demo yang belakangan ini terjadi di negara kita. Dengan demikian, pendidikan dan pengamalan nilai-nilai karakter pada masa kanak-kanak masih perlu diajarkan dan dioptimalkan.

Karakter sopan santun merupakan salah satu nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap manusia (Lickona, 2009). Sopan santun merupakan sikap tata krama dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kepribadian serta budi pekerti yang luhur (Zuriah & Yustianti, 2007). Namun sebagian besar anak-anak masih dapat belum bisa mengontrol diri mereka dalam menyikapi norma sopan santun di dalam kehidupannya. Menurut Angelina (2013), penguasaan pada diri atau kontrol diri merupakan faktor penyebab yang dapat menimbulkan penyimpangan pada remaja, hal ini disebabkan karena dalam diri remaja belum mampu mengatur dorongan emosi dan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi sehingga tindakan yang dilakukan belum tepat.

Syamsiyatun & Wafiroh (2013) mengatakan bahwa Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara, lewat nilai, moral, norma dan etika yang ditanamkan sebagai bagian dari landasan filosofis serta kepribadian negara-bangsa. Maka dapat ditemukan kesesuaian dari nilai kepribadian dengan wilayah birokrasi pada ranah *governance*, sekaligus “penjaga” regulasi pada tingkat etika berbangsa dan bernegara. Dari hasil analisis Bertens (2007, hal. 6) dapat disimpulkan bahwa etika memiliki tiga posisi yaitu antara lain sebagai berikut (1) sistem nilai, hal ini berarti nilai-nilai dan norma-norma menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang maupun sekelompok orang dalam mengatur tindakan dan tingkah lakunya, (2) kode etik, yaitu kumpulan asas atau nilai moral, dan (3) filsafat moral, yaitu ilmu tentang membedakan yang baik dan yang buruk.

Pemahaman Pancasila bukan hanya sebagai pandangan hidup, kepribadian, ideologi dan kebudayaan bangsa-negara melainkan juga merupakan standar dari etika, kristalisasi nilai, serta manifestasi norma, dalam perspektif moral-pikiran tindakan-ucapan. Dengan demikian, seluruh ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara berada dalam kawasan landasan ideologi Pancasila. Hal ini menegaskan kepada arti ideologi itu sendiri, menurut Althusser (2015) berpendapat bahwa ideologi merupakan relasi imajiner individu terhadap kenyataan real eksistensi mereka, yakni ideologi berperan sebagai kekuatan material dalam masyarakat yang menyerap individu-individu sebagai subjek pada ideologi tertentu misalnya relasi imajiner guru-murid menghasilkan praktik material tentang cara berinteraksi antara guru dan murid (Adian, 2005).

Pendidikan etika atau moral yang diajarkan pada anak adalah tanggungjawab bersama antara sekolah dan orang tua. Kerjasama antara pihak sekolah dan orangtua sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan serta pembentukan karakter pada anak. Sehingga anak dapat memiliki karakter yang kuat dan baik (Sunu & Ujningsih, 2010).

Guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan serta membantu pekerjaan peserta didik sehingga memiliki moral dan perilaku yang baik serta melindungi peserta didik dari hal yang dapat merusak kepribadiannya. Selain itu, peserta didik juga dibimbing cara berkomunikasi sesuai dengan norma, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat. Amanah ini haruslah dipegang teguh dan dilaksanakan oleh para pendidik di

sekolah karena peserta didik merupakan tanggung jawab para pendidik untuk dapat mengarahkan mereka pada hal-hal kebaikan. Apalagi pada usia muda peserta didik sedang mengalami perkembangan yang peka terhadap pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar mereka. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak kita amati tingkah laku yang tidak memiliki etika di kalangan anak-anak muda dan remaja. Sebagai contoh, pelanggaran etika di jalan raya, berlaku tidak sopan pada orang yang lebih tua, berkata kasar pada teman, tidak menaati peraturan sekolah, melawan terhadap guru, dan bersikap antisosial (Djuwita, 2017).

Pendidik haruslah dapat memahami dengan baik visi, misi maupun tujuan dari pembelajaran PPKn, memahami konsep-konsep nilai dan moral sehingga dapat membantu dalam pembinaan perilaku etika sopan santun, membuat model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembinaan etika sopan santun.

Visi Pembelajaran PPKn (2016-2020) adalah “menjadi pusat pengembang dan penghasil Ilmu Kewarganegaraan (IKn) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang cerdas dan berkarakter Pancasila”. Secara khusus visi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah dapat menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan kepribadian selaku warga Negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat yang madani.

Misi dari pembelajaran PPKn adalah membantu warga Negeranya sehingga mampu menunjukkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia serta keadaan berbangsa dan bernegara dan menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan. membantu warga Negara agar mampu menunjukkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta keadaan berbangsa, bernegara dan menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kompetensi untuk dapat menguasai kemampuan berfikir, berpandangan luas, bersifat rasional, dinamis serta menjadikan warga negara memiliki wawasan nusantara.

Hasil dari belajar adalah perubahan tingkah laku siswa baik terkait pemahaman, keterampilan maupun aspek lain pada mata pelajaran di sekolah, maupun dilihat dari aspek etika sopan dan santun dari siswa. Pengoptimalan kegiatan pendidikan karakter di sekolah sangat penting baik bagi peserta didik maupun guru. Kegiatan tersebut diperlukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul baik dibidang moral maupun akademik (Putra, Imron, & Benty, 2020). Namun, penyebab dari etika sopan santun yang kurang memuaskan dapat berasal dari dalam diri siswa dan berasal dari lingkungan siswa belajar. Lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi etika sopan santun siswa dari luar. Slameto (2010) menyatakan bahwa salah satu faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar adalah model pembelajaran.

Jadi pendidikan adalah faktor utama dalam menciptakan keadaban dan kebajikan (*civic virtue*) bagi bangsa. Keadaban dalam bersikap, keadaban dalam keluarga, forum, lingkungan, pemerintah, keadaban dalam berkomunikasi, keadaban dalam berinteraksi, keadaban dalam mengambil keputusan/ kebijakan, keadaban dalam memimpin, bahkan sampai yang dipimpin harus mempunyai nilai keadaban. Sehingga semua saling bersinergi, saling menjaga, saling mengontrol, saling mengingatkan dan saling mengamankan dari hal yang negatif.

Hasil observasi yang dilakukan di GBI Sukma Medan khususnya untuk anak-anak sekolah minggu yang terdiri dari kelas III-IV pada pembelajaran PPKn khususnya

mengenai etika sopan santun, proses penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak sekolah minggu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa anak terkait dengan pemahaman norma sopan dan santun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan cara pembinaan etika sopan santun melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada anak-anak sekolah Minggu GBI Sukma Medan yang terdiri dari kelas III-IV.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode deskriptif kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan menemukan jawaban (Mulyana, 2008, hal. 145). Pada metode wawancara, metode wawancara sendiri merupakan teknik pengambilan data oleh peneliti yang langsung berdialog dengan responden untuk mendapatkan informasi dari responden. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang tersusun secara jelas dan terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang hanya memuat garis besar pada pertanyaan yang akan ditanyakan.

Peneliti melakukan wawancara pada anak sekolah Minggu GBI Sukma Medan untuk menggali pemahaman responden mengenai konsep norma sopan santun serta pelaksanaan dari norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Metode penelitian selanjutnya adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode pengumpulan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek-objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari perannya (Arikunto, 2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang diteliti dan keseluruhannya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan tidak dipaksa untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo, 2010).

Sementara itu, menurut Prasanti (2018), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam meneliti objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan utuh tentang pembinaan perilaku norma sopan santun pada anak sekolah Minggu GBI Sukma Medan. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah kegiatan pembinaan etika sopan santun melalui pembelajaran PPKn melalui teknik bercerita. Populasi penelitian adalah seluruh anak-anak sekolah Minggu GBI Sukma Medan yang terdiri dari kelas III-VI Sekolah Dasar. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi dan dalam pedoman wawancara yang telah dibuat sebelum terjun ke lapangan (GBI Sukma Medan). Analisis data dilakukan saat dilapangan dan sesudah di lapangan. Data dianalisis secara narasi dengan pemaknaan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang telah dilakukan, disini penulis dapat menguraikan tentang pemahaman anak-anak di sekolah minggu GBI Sukma terkait dengan norma sopan santun dan penerapan dalam norma dan nilai sopan santun dalam kehidupan sehari-hari serta dilakukannya pembinaan melalui teknik bercerita agar dapat membandingkan pemahaman norma sopan santun sebelum diberikan pembinaan dan sesudah diberikan pembinaan melalui teknik bercerita mengenai norma sopan santun.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil mengenai bagaimana pemahaman anak-anak sekolah minggu terkait dengan norma sopan santun, serta mengetahui perbandingan pemahaman norma sopan santun sebelum diberi pembinaan dan sesudah diberi pembinaan melalui teknik bercerita mengenai etika sopan santun.

Pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan Pada Anak Sekolah Minggu GBI Sukma Medan

Berdasarkan temuan penelitian, anak di sekolah minggu GBI Sukma Medan masih belum sepenuhnya memahami konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dibuktikan oleh jawaban anak-anak GBI sukma atas pertanyaan peneliti pada saat melakukan wawancara. Peneliti memberikan satu pertanyaan mengenai apakah mereka sudah mempelajari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa anak menjawab mereka pernah mempelajarinya, begitu juga dengan beberapa anak yang lainnya, semua anak yang ikut diwawancara menjawab bahwa mereka sudah belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya peneliti kembali bertanya, dan pertanyaannya mengenai sejak kapan mereka sudah mempelajari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jawaban-jawaban dari setiap anak berbeda-beda. Namun kebanyakan anak menjawab bahwa mereka sudah belajar Pendidikan Kewarganegaraan sejak mereka kelas 1 SD.

Dari proses wawancara dapat kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka menjawab Pendidikan Kewarganegaraan adalah pelajaran yang mempelajari tentang hukum dan peraturan negara. Hal ini membuktikan bahwa mereka mengenal hukum maupun aturan-aturan negara, dan UUD saja. Mereka belum mengerti implementasi dan nilai-nilai dari setiap butir-butir Pancasila. Karena sebenarnya Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk dapat mengacu pada pendidikan karakter anak-anak bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bidang kajian di dalam pendidikan nasional yang berperan lebih strategis untuk meningkatkan kembali mengenai wawasan kebangsaan, semangat nasionalisme. Karena itu, dalam memperkuat peranan penting PPKn, maka dari itu, pemerintah disini dan saat ini mewajibkan memberikan dan diberikan pada setiap satuan pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Yang dimana sesuai dari dalam pasal 37 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi sosok manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Karena itu, negara bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara yang tinggi dan juga memiliki semangat nasionalisme di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut seorang tokoh, yakni Edmonson (dalam Ubaedillah & Rozak, 2011, hal. 5) makna kata *Civics* selalu dapat didefinisikan sebagai suatu pengajaran tentang pemerintahan dan suatu kewarganegaraan yang terkait dalam kewajiban, hak, bahkan hak-hak istimewa warga negara itu sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang lebih condong memfokuskan dalam pembentukan warga negara yang dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

PPKn memiliki tujuan untuk membangun karakter seseorang (*character building*) negara Indonesia, antara lain: a. dalam membentuk kecakapan partisipatif warga negara, b. dapat mewujudkan dan menjadikan warga negara yang aktif, cerdas, kritis dan demokratis, namun disatu sisi tetap memiliki satu komitmen dalam menjaga persatuan dan integritas bangsa negara; c. dapat menumbuh kembangkan kultur demokrasi yang memiliki adab, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab (dalam Ubaedillah & Rozak, 2011, hal. 9).

Sebagaimana Winataputra (2014), dilihat dari segi holistik, PPKn bertujuan agar setiap masyarakat negara muda (*young citizens*) dapat memiliki rasa wawasan kebangsaan bahkan cinta tanah air dalam segi konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai serta komitmen Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan adanya perkembangan psikologis mereka dan dalam konteks kehidupan secara sistematis difasilitasi untuk dapat belajar berkehidupan demokrasi secara utuh.

Pemahaman Konsep Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Minggu GBI Sukma Medan

Berdasarkan temuan penelitian, anak di sekolah minggu GBI Sukma masih belum sepenuhnya memahami konsep Pendidikan Karakter. Hal ini dibuktikan oleh jawaban anak-anak GBI Sukma atas pertanyaan peneliti pada saat melakukan wawancara, jawaban mereka memiliki perbedaan antara satu dengan jawaban yang lainnya, dan dapat dilihat mereka seperti tidak tahu dan kebingungan bagaimana menjawabnya.

Peneliti memberikan satu pertanyaan mengenai apakah mereka sudah mempelajari pelajaran Pendidikan Karakter, keseluruhan anak yang bersekolah di GBI Sukma Medan, masih belum mempelajari pendidikan karakter selama mereka bersekolah, dapat dilihat pada saat peneliti melakukan proses wawancara, mereka kebingungan dan tidak mengetahui pendidikan karakter itu seperti apa.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya, dan pertanyaannya mengenai pemahaman mereka tentang pengertian karakter. Jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh setiap anak berbeda-beda. Namun kebanyakan anak menjawab bahwa karakter merupakan sifat yang dimiliki tiap-tiap anak, dan tiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda di dunia.

Dari proses wawancara dapat kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka masih pasif menjawab mengenai konsep bahkan pengertian dari karakter yang sesungguhnya, mereka juga masih belum dapat menentukan karakter yang baik itu seperti apa, dan apa yang dilakukan untuk menciptakan karakter yang baik, dan sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Suyanto (2010), karakter merupakan pola pikir dan cara berperilaku yang menjadi salah satu ciri khas tiap suatu individu untuk hidup dan mampu bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sementara itu, pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti, dimana hal ini melibatkan aspek pengetahuan seseorang (*cognitive*), aspek perasaan (*feeling*) dan aspek tindakan (*action*). Tanpa ketiga aspek-aspek tersebut, maka suatu pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan efektif.

Kemendiknas (2011) menyampaikan bahwa nilai luhur adat dan budaya suatu bangsa Indonesia telah diidentifikasi menjadi 18 nilai karakter, yakni: religius, jujur toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Menurut Sri (2012) Sikap pribadi seseorang dapat ditentukan oleh faktor lingkungan dan dengan landasan teori *conditioning* ada fungsi bahwa karakter ditentukan oleh lingkungan. Satu pribadi akan menjadi pribadi yang memiliki karakter apabila mereka dapat tumbuh pada suatu lingkungan yang berkarakter. Tentunya, hal ini memerlukan usaha secara menyeluruh yang dapat dilakukan seluruh pihak: meliputi keluarga, sekolah dan seluruh komponen yang terdapat di dalam masyarakat.

Dalam pengertian sederhana, menurut Samani & Hariyanto (2011), pendidikan karakter dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengandung hal-hal positif apa saja yang dilakukan oleh seorang guru dan dapat berpengaruh kepada siswa yang diajarinya. Samani & Hariyanto (2011) mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk menarkan nilai kepada para siswanya. Pendidikan karakter menjadi suatu pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan *social*, pengembangan *emotional* dan pengembangan *ethic* para siswa. Pendidikan karakter juga dapat diartikan sebagai suatu upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah, dalam membantu siswa untuk dapat mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai *ethics* dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kerajinan, sportifitas, keuletan dan ketabahan, bertanggung jawab, dapat menghargai diri sendiri bahkan dengan orang lain.

Sedangkan, pengertian nilai menurut Zaqiah & Rusdiana (2014) adalah “segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat”. Sedangkan Asrori (2015) memaparkan, nilai sebagai suatu yang dapat diyakini kebenarannya dan dapat mendorong seseorang untuk mewujudkannya. Adanya nilai memungkinkan individu ataupun suatu kelompok sosial dalam membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai dan dibutuhkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran

Pembelajaran merupakan aspek yang kompleks dan melibatkan berbagai hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif diperlukan berbagai keterampilan. Belajar merupakan istilah kunci yang vital dalam suatu usaha pendidikan, sehingga tanpa mereka belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar sendiri memiliki tujuan untuk mengadakan suatu perubahan dalam diri seseorang, baik itu perubahan dari baik menjadi buruk dan penambahan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam dirinya.

Namun, tidak semua perubahan dikatakan belajar. Tentunya, perubahan sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri yang khas. Setiap perilaku belajar yang dapat ditandai dengan perubahan yang spesifik (Susanto, 2011).

Banyak hal yang dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa, menurut Dalyono (2007, hal. 55) adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar, faktornya ada dua yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari dalam (eksternal). Faktor dari dalam (internal) terdiri dari: kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar. Faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar seseorang dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut. Pertama, kesehatan. Apabila kesehatan fisik seseorang selalu tidak sehat, dapat tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula apabila dalam kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, dapat mengganggu atau dapat mengurangi semangat untuk belajar. Kedua, intelegensi dan bakat. Seseorang yang mempunyai intelegensi tinggi, pada umumnya lebih mudah dan hasilnya cenderung lebih baik dibanding dengan seseorang yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah, cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, berfikir lambat sehingga prestasi belajarnya rendah. Apabila seseorang mempunyai intelegensi tinggi dan memiliki bakat dalam bidang yang dipelajarinya, maka proses belajarnya akan lebih lancar dan sukses dibanding dengan orang yang mempunyai bakat saja tapi intelegensinya rendah.

Ketiga, minat dan motivasi. Minat yang besar yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya cenderung menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibanding dengan orang yang mempunyai minat yang kurang. Keempat, cara belajar. Cara belajar seseorang juga dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Seseorang yang belajar perlu memperhatikan teknik, faktor fisiologis, psikologi, dan ilmu kesehatan agar memperoleh hasil yang memuaskan.

Faktor eksternal meliputi: sekolah, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, keluarga. Pencapaian hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, upah/gaji orang tua, perhatian dan bimbingan dari orang tua, kerukunan kedua orang tua, keakraban hubungan anak dengan kedua orang tua, keadaan dan situasi dalam rumah serta ada tidaknya media belajar.

Kedua, sekolah. Meliputi kualitas suatu guru, metode guru dalam mengajar, kurikulum yang sesuai dengan kemampuan anak, fasilitas atau perlengkapan yang memadai, keadaan dalam ruangan, jumlah siswa per kelas dan sebagainya. Ketiga, masyarakat. Apabila disekitar tempat tinggal dihimpit oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki moral yang baik pula, niscaya hal ini akan memotivasi dan mendorong anak untuk giat belajar. Keempat, lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi lingkungan, rumah, suasana lingkungan sekitar, keadaan lalu lintas dan iklim juga turut dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Menurut Purwanto (2004, hal. 102) dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi, mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni:

- a. Faktor yang dimiliki oleh diri pribadi itu sendiri atau dapat dikatakan sebagai faktor individual. Dimana, di dalam faktor individual terdapat faktor kematangan, faktor kecerdasan, latihan, faktor motivasi bahkan faktor pribadi.

- b. Faktor yang berasal dari luar atau yang biasa disebut sebagai faktor sosial. Untuk faktor sosial itu sendiri, yang termasuk faktor-faktornya adalah sebagai berikut: Faktor dalam keluarga, faktor guru, faktor alat-alat yang biasa digunakan dalam proses belajar mengajar, lingkungan sekitar bahkan suatu kesempatan yang disediakan dan motivasi sosial itu sendiri.

Tohirin (2006, hal. 127) berspekulasi dan memberitahukan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi belajar dalam dua aspek, yakni:

- a. Aspek fisiologis, aspek fisiologis meliputi keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang. Berkaitan dengan ini, kondisi organ organ khusus seperti tingkat kesehatan pendengaran, penglihatan yang juga dapat mempengaruhi seorang siswa di dalam penyerapan informasi atau pelajaran.
- b. Aspek psikologis, aspek psikologis meliputi tingkat kecerdasan/intelegensi, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi, perhatian, kematangan dan kesiapan.

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan berpengaruh satu dengan yang lain. Seorang peserta didik yang memiliki sikap *conserving* dalam ilmu pengetahuan, biasanya ia cenderung melakukan pendekatan belajar yang lebih sederhana dan tidak secara mendalam. Berbanding terbalik dengan peserta didik yang memiliki intelegensi yang tinggi dan ia mendapat dorongan yang lebih kearah positif dari kedua orang tuanya, dapat dipastikan mereka akan lebih memilih pendekatan belajar yang lebih kearah dan suasana yang lebih mementingkan kualitas dari hasil pembelajaran. Jadi, dengan adanya pengaruh faktor di ataslah, muncul siswa-siswi yang lebih *high-achievers* (berprestasi tinggi) dan juga *under-achievers* (berprestasi rendah) bahkan gagal sama sekali di dalam hidupnya.

Pemahaman Norma Sopan Santun Terhadap Anak Sekolah Minggu GBI Sukma

Berdasarkan temuan penelitian, anak sekolah minggu GBI Sukma Medan belum sepenuhnya memahami mengenai norma sopan santun. Hal ini dibuktikan oleh jawaban anak-anak GBI sukma atas pertanyaan peneliti pada saat melakukan wawancara.

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran PPKn pasti ada yang namanya norma sopan santun, dan peneliti meminta mereka memberikan jawaban pengertian dari norma sopan santun, yang telah mereka pelajari sebelumnya, namun kebanyakan dari mereka menjawab bahwa norma sopan santun itu adalah sikap yang sopan kepada orang sekitar dan orang lain, sikap sopan yang wajib kita lakukan kepada orang lain. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan dari uraian berbagai jawaban yang disampaikan anak-anak sekolah GBI Sukma dapat dilihat bahwa masih kurangnya pemahaman mereka mengenai norma sopan santun. Anak-anak sekolah minggu banyak menyebutkan penerapan norma tersebut.

Zuriah & Yustianti (2007) mengemukakan bahwa sopan santun adalah sikap dan perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, pada tahun terakhir ini, nilai budaya sopan santun khususnya di sekolah mengalami penurunan. Dimana, hal tersebut dapat kita lihat dari generasi muda zaman sekarang yang lebih cenderung meninggalkan etika bahkan norma sopan santun terhadap teman-teman sebayanya bahkan orang yang lebih tua darinya bahkan sosok gurunya pun mereka kadang tidak memiliki etika yang baik. Peserta didik zaman sekarang jarang ada yang menganggap bahwa guru sebagai sosok panutan, seorang

yang dapat memberikan ilmu serta pengetahuan yang patut dicontoh, dihormati bahkan disegani.

Marzuki & Fatma (2015, hal. 59) mengungkapkan “*Character education is a planned effort to make the student familiar, caring and the values that to be good learners*” (Pendidikan karakter adalah usaha yang direncanakan untuk membuat peserta didik menjadi kenal, peduli dan menerapkan nilai-nilai demi menjadi pembelajar yang baik). Oleh karena itu pendidikan karakter perlu diberikan ke peserta didik sejak dini untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang berjiwa karakter, mengingat bahwa nilai-nilai karakter anak bangsa saat ini sudah mulai luntur, khususnya pada kesopanan, kejujuran dan tanggung jawab.

Indikator nilai kesopanan (Inrawati, 2015, hal. 4) dapat dilihat dari sikap: (1) mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu baik dari orang tua maupun orang lain sekaligus mengajarkan menghargai jerih payah orang lain, (2) mengucapkan maaf jika bersalah untuk dapat melatih sportivitas dan sikap yang berani dalam mengakui kesalahan, (3) mengucapkan kata tolong ketika ingin meminta bantuan dan meminta mengambilkan sesuatu (4) menyapa, memberikan kata salam atau mengucapkan kalimat permissi jika bertemu orang yang tidak dikenal dan dikenal, dapat memberi pengajaran tentang perilakuyang ramah dan dapat mudah bersosialisasi dengan orang lain, (5) mengajarkan sebagaimana berbudi bahasa yang baik dan tutur kata yang sopan misalnya tidak berteriak-teriak ataupun tidak memotong perkataan yang keluar dari orang lain.

Karakter anak bangsa saat ini mulai memudar, satu diantaranya adalah lingkungan. Pergaulan lingkungan yang tidak baik dapat menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan hal yang tidak baik pula, yang dilakukan temannya sebagai wujud merasa diri hebat bisa melakukan hal demikian. Faktor pembentuk kepribadian dapat terjadi melalui faktor internal/dalam maupun faktor eksternal/luar. Faktor Internal/dalam tersebut dapat berupa kebutuhan psikologis (rasa aman, penghargaan, penerimaan, aktualisasi diri) dan kebutuhan pemikiran. Sedangkan faktor eksternal berupa faktor lingkungan (keluarga dan teman bermain / berkumpul), faktor sosial, pendidikan, maupun faktor figuritas.

Lickona (2009) sendiri berpendapat bahwa di dalam suatu budaya jawa sikap sopan santun ditandai dengan perilaku saling menghormati kepada orang yang lebih tua daripada kita, penggunaan bahasa ketika menyampaikan sesuatu dengan sopan serta tidak memiliki sifat yang arogan. Sementara itu, menurut Chazawi (2007) kata santun merupakan kata sederhana dengan arti yang sangat luas dan berisi nilai positif yang dapat dicerminkan dalam perilaku dan suatu perbuatan yang lebih kearah positif. Perilaku yang mengarah ke arah positif dapat dikenal dengan santun yang dapat diimplementasikan dalam gaya berbicara, berpakaian, memperlakukan orang lain, serta gaya mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun kita berada. yang dapat diimplementasikan pada cara berbicara, cara berpakaian, cara memperlakukan orang lain, cara mengekspresikan diri dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan Lickona dan Chazawi, maka dari itu dalam penelitian yang telah dilaksanakan, aspek-aspek nilai sopan dan santun merupakan suatu nilai dalam menghormati dan nilai kesopanan.

Menurut Mahfudz (2010), kurangnya nilai sopan santun pada anak zaman sekarang dikarenakan dan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor dalam dan luar lingkungan serta kurangnya sebuah perhatian dari orang tua dan juga dipengaruhi oleh perkembangan IPTEK yang sangat marak-maraknya, sehingga anak dapat mudah meniru

perbuatan yang lebih kearah negatif. Maka dari itu peran orang tua dan sosok guru sangatlah penting di dalam pembentukan karakter budaya sopan santun terhadap anak.

Strategi Penanaman dan Pembinaan Norma Sopan Santun Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah peneliti mendapatkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan dari anak-anak sekolah GBI Sukma belum mengetahui dengan baik terkait dengan norma sopan santun, sehingga peneliti melakukan peninjauan ulang pada permasalahan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman anak-anak sekolah GBI Sukma terkait dengan norma sopan santun yang sebelumnya sudah dipelajari di sekolah mereka, dan disini peneliti memberikan pembinaan secara langsung mengenai norma sopan santun dengan teknik bercerita.

Sehingga, ketika peneliti mengetahui permasalahan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman anak-anak sekolah GBI Sukma mengenai norma sopan santun, peneliti melakukan pembinaan secara langsung mengenai norma sopan santun dengan teknik bercerita, tujuannya agar dapat meminimalisir permasalahan yang mengakibatkan anak-anak sekolah GBI Sukma tidak memahami secara benar mengenai norma sopan santun.

Anak-anak di sekolah minggu GBI Sukma Medan sangat antusias dan sangat menyimak ketika peneliti melakukan pembinaan terhadap mereka. Ada beberapa anak yang mencatat dan menyimak dan terdapat juga anak dengan hanya menyimak, karena kita tahu tiap-tiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Disini, peneliti bercerita tentang apa itu sopan santun, apa hubungan antara norma sopan santun dengan Pendidikan Kewarganegaraan, bagaimana penerapan norma sopan santun yang baik dan benar, pelanggaran yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan norma sopan santun, serta memberitahukan mereka apa yang menjadi permasalahan sehingga mereka kurang memahami mengenai norma sopan santun.

Setelah itu, peneliti memberikan pembinaan kepada anak-anak di sekolah minggu GBI Sukma dan kembali mengajukan pertanyaan seperti sebelumnya yakni mengenai konsep norma sopan santun, dan apa pengertiannya dengan wawancara, namun disini pertanyaan yang diajukan berbeda dari pertanyaan sebelumnya, yang dimana pada pertanyaan ini, peneliti meminta mereka untuk menyebutkan contoh dari penerapan norma sopan santun.

Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh seluruh anak sekolah minggu di GBI Sukma, peneliti langsung mendapat kesimpulan, bahwasannya mereka sudah memahami dengan baik serta tahu penjelasan norma sopan santun dan contoh penerapan norma-norma kesopanan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, peneliti menyimpulkan bahwasannya pembinaan dengan teknik bercerita cocok dan sesuai diterapkan kepada anak di sekolah minggu GBI Sukma Medan.

Sopan Santun dalam pembelajaran PPKn dan strategi guru dalam menanamkan sikap sopan santun di dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan proses pendekatan antara siswa dengan guru dalam proses kegiatan pembelajaran, seluruh proses pembelajaran yang terkandung nilai karakter sehingga guru dapat menggunakan beberapa strategi, dengan melakukan diskusi, bimbingan secara kelompok dalam bermain peran, *talking stick* dan lain sebagainya, serta disini guru dapat menjadi sosok yang teladan bagi

siswa di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran tersebut. Adapun strategi bimbingan secara kelompok dalam bermain peran dapat memberikan peningkatan interaksi antara guru dengan peserta didik (Ainah, Sarbaini, & Adawiah, 2016). Menurut Ilahi (2014), Indonesia merupakan Negara yang mengalami kegagalan dalam implementasi pendidikan karakter.

Lingkungan keluarga juga merupakan faktor yang mempengaruhi dan suatu faktor penentu dalam perkembangan seorang anak. Apabila suatu nilai pendidikan karakter dapat ditanamkan sejak usia dini serta pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus layaknya membiasakan diri dalam bersikap sopan santun, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dapat menghargai sesama dan saling tolong menolong sesama umat, maka dari itu, sosok peserta didik tersebut akan dapat dijadikan contoh yang teladan serta sosok yang baik bagi generasi-generasi berikutnya. Yang dimana, dikatakan dan berdasarkan fakta, bahwa orang tua dalam hal keterlibatan pemantauan perkembangan anak saat di lingkungan rumah sangatlah penting. Hal ini karena pada masa kanak-kanak/ usia dini merupakan suatu masa pembentukan menara/pondasi dan suatu masa kepribadian yang akan dapat menentukan pengalaman si anak selanjutnya.

Guru perlu melakukan sebuah upaya atau merumuskan model khusus dalam mendidik para peserta didik menjadi generasi masa depan untuk meningkatkan karakter kesopanan, kejujuran dan tanggung jawab. Pada desain penelitian ini, sebuah model penanaman nilai menggunakan model secara sederhana sudah ada dan sudah diterapkan di sekolah tersebut, namun belum terlalu mendalam, karena pada hakikatnya merupakan sebuah model keteladanan.

Kegiatan dalam melaksanakan pendidikan karakter, dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran kontekstual. Penerapan dalam pendidikan karakter dengan menggunakan model kontekstual sangatlah cocok dan sesuai, karena suatu pembelajaran kontekstual dapat mengajak bahkan menghubungkan topik materi yang telah dipelajari dengan kehidupan nyata. Melalui pembelajaran kontekstual peserta didik dapat memperoleh hasil yang komprehensif tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada kognitif dan psikomotor.

Pembiasaan Sopan Santun dan Pendidikan Karakter

Memprihatinkan melihat generasi saat ini memiliki kepribadian yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kesopanan terhadap sosok orang yang lebih tua dari mereka sudah mulai diabaikan. Selain kesopanan, nilai kejujuran serta nilai tanggung jawab sosok peserta didik juga mulai menipis. Menipisnya nilai kejujuran terlihat dari masih ada peserta didik yang berbohong ketika ditanya guru, ketika menemukan barang milik orang lain di kelas, mengaku ngaku barang milik orang lain maupun membuang sampah disembarang tempat, menyontek, alasan keluar masuk kelas, maupun alasan tidak mengerjakan PR (Ariska, Marzuki, & Rosnita, 2018).

Banyak faktor yang menyebabkan nilai-nilai karakter anak bangsa saat ini mulai memudar, satu diantaranya adalah lingkungan. Pergaulan lingkungan yang tidak baik dapat menyebabkan seseorang terdorong melakukan sesuatu yang tidak baik pula, yang dilakukan temannya sebagai wujud merasa diri hebat bisa melakukan hal demikian. Faktor pembentuk kepribadian dapat terjadi melalui faktor internal maupun faktor dalam/eksternal. Faktor internal tersebut dapat berupa kebutuhan psikologis (rasa aman, penghargaan, penerimaan, aktualisasi diri) dan kebutuhan pemikiran. Sedangkan faktor

eksternal berupa faktor lingkungan (keluarga dan teman bermain/berkumpul), faktor sosial, pendidikan, maupun faktor figuritas (Ariska et al., 2018).

Pendidikan karakter sebenarnya bukan merupakan hal baru bagi pendidikan di Indonesia. Jika kita lihat ke belakang proses pendidikan karakter sebenarnya telah dilakukan oleh para guru pada saat itu, bahkan pembiasaan sopan santun telah terjadi pada saat itu. Namun dengan perkembangan kehidupan semakin modern ini dan para guru yang pada saat itu telah diganti dengan guru-guru pada era modern tampaknya kecenderungan proses pendidikan lebih mengutamakan pada pendidikan untuk pencapaian kemampuan intelektual semata. Proses pendidikan karakter seakan terlupakan (Sunu & Ujningsih, 2010).

Proses pendidikan karakter bukan berarti perubahan kurikulum atau menentukan satu bidang pelajaran tentang karakter, akan tetapi pendidikan karakter lebih pada proses pembentukan karakter siswa melalui penerapan dalam kehidupan di sekolah dan di rumah. Oleh karena itu proses pendidikan karakter ini semestinya dilakukan secara bersama-sama antara orang tua dan pihak sekolah. Kerjasama dapat dilakukan dalam implementasi dan pembiasaan. Ada pula metode di dalam pembelajaran pendidikan karakter, yakni, metode dalam suatu pendidikan karakter seharusnya menggunakan pembelajaran yang konservatif dan hierarkis (Althof & Berkowitz, 2006, hal. 500).

Pada dasarnya pendidikan karakter di sekolah tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Keberadaan mata pelajaran agama, pendidikan moral Pancasila, bimbingan dan penyuluhan adalah wujud nyata bahwa sekolah telah memberikan porsi pendidikan karakter pada siswa. Namun demikian pelaksanaan dari pembelajaran mata pelajaran tersebut lebih mengutamakan pada aspek pengetahuan, sehingga penilaian pencapaian kompetensi juga pada aspek pengetahuan, bukan pada aspek penerapan yang ditunjukkan pada sikap siswa. Pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan positif baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk itu sekolah sebagai lembaga formal harus memasukkan pendidikan karakter melalui semua materi pelajaran di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Karena dalam mewujudkan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang bermutu dan berbudaya, bukan hanya cerdas serta beriman saja, tetapi haruslah juga memiliki hati yang baik, memiliki perasaan terhadap orang lain serta dalam hal etika. Dalam mendidik anak terhadap berbagai nilai seharusnya dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara terus menerus dan berhubungan antara pendidikan keluarga, sekolah, maupun kepada masyarakat di sekitar (Wiyani, 2012).

Pendidikan nilai tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi dapat juga dilakukan di keluarga dan masyarakat yang mencakup teman sebaya dan media massa. Banyak penelitian yang terkait dengan lingkungan dan pembentukan karakter. Penelitian yang telah dilakukan Alit (2003), Koyan (2001), serta Bulach (2002), mendapat kesimpulan dan menyimpulkan bahwasannya lingkungan sekitar tempat tinggal sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan karakter anak-anak.

Pendidikan karakter sangatlah perlu, dengan adanya pendidikan karakter, akan tercipta kondisi yang sangat menyenangkan dan terbentuknya suasana keakraban antara guru dengan peserta didik. Seperti yang dicetuskan oleh Thorndike dalam teori yang dicetuskannya, yakni *“response is strengthened if is followed by wet satisfying consequences and weakened if is followed by dissatisfying consequences”*. Artinya *“hubungan antara respon dan stimulasi akan dapat bertambah erat apabila ditambahkan dengan rasa senang dan puas dan sebaliknya kurang erat”*. Sesuai dengan teori yang

dipaparkan, bahwa hubungan respon antara peserta didik dengan guru sangatlah penting untuk proses penerapan dan pengembangan pendidikan karakter norma sopan santun, dengan terjalin hubungan kedekatan antara peserta didik dengan guru dan adanya respon dari peserta didik di dalam sistem pendidikan akan lebih baik dan meningkat serta terjalinnya keharmonisan antara guru dengan siswa-siswi/peserta didik (Ainah et al., 2016).

Oleh karena itu, mungkin fokus penilaian pada mata pelajaran tersebut perlu ditambahkan dengan penilaian aspek afektif melalui pengamatan dari guru. Indikator-indikator penilaian yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa perlu dibuat agar arah dari pembentukan karakter siswa lebih mudah dilakukan dan terukur. Proses dalam pembudayaan terhadap sikap sopan santun dapat dilakukan melalui suatu pembiasaan yang dilakukan di sekolah maupun di rumah melalui suatu kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua yang merupakan satu contoh bagaimana pendidikan karakter dapat dilakukan.

Hambatan dalam Proses Penanaman Nilai Kesopanan, Kejujuran dan Tanggung Jawab

Remaja sebagai individu yang cenderung kritis dan rasa keingintahuan yang tinggi merasa penyimpangan dalam hal tata bahasa dirasanya itu bagian dari suatu inovasi yang baru. Remaja memang menganggap hal-hal yang dulunya masih dianggap sopan sekarang sudah tidak lagi, perkembangan pola pikir ini mungkin disebabkan oleh berbagai hal.

Penanaman nilai-moral adalah suatu cara menanamkan nilai-moral yang dilaksanakan orang tua secara terus menerus dalam suatu lingkungan keluarga sejak anak lahir sampai usia pertumbuhan sempurna agar anak mampu mengontrol perilakunya sendiri dengan acuan dari nilai-nilai moral. Penanaman nilai-moral tersebut dilakukan dengan memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri anak. Nilai-nilai sosial sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak, karena kita menanamkannya kepada mereka, nilai sosial mereka akan tumbuh, dan kita tahu bahwa nilai sosial memiliki fungsi sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan dengan sesama umat, sehingga keberadaannya dapat dengan mudah diterima di lingkungan masyarakat (Wibawa, Suyahmo, & Setiajid, 2012).

Hambatan yang ditemui dalam penanaman nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab yaitu dukungan orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam pembiasaan rasa tanggung jawab siswa yang perlu untuk ditingkatkan. Peserta didik di rumah terbiasa melakukan sesuatu dengan bantuan asisten rumah tangga, sehingga kebiasaan tersebut masih terbawa hingga ke sekolah. Namun dapat dilihat, bahwa orang tua sekarang banyak yang salah mendidik anak, menciptakan emosi yang stabil pada anak, sehingga hal inilah yang menjadi hambatan siswa dalam melaksanakan norma sopan santun di dalam hidupnya.

Seharusnya, sebagai orang tua, kita harus dapat memahami bahwasannya ketika kita menyampaikan suatu pesan mengenai pendidikan, diperlukan adanya pemahaman tentang cara bagaimana agar pesan yang kita sampaikan itu dapat tercapai dan sampai dengan baik serta dapat diterima untuk anak mencapai ketersampaian pesan orang tua kepada anaknya, tentunya jika kita menjadi sosok orang tua kita harus memiliki keterampilan untuk menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan pemikiran dan dalam perkembangan psikologi si anak. Ketepatan atau kesesuaian akan dapat

berpengaruh dalam keberhasilan penanaman moral untuk anak. Pada masa anak-anak sering disebut sebagai masa yang penuh dengan problematika, karena anak sangat rentang terhadap segala sesuatu yang ada dihadapan mereka. Wajar apabila para orang tua sering kehabisan kesabaran dalam mengasuh anak (Wibawa et al., 2012).

Kemudian di dalam hal strategi, sistem pembelajaran memiliki tujuan untuk membantu siswa dalam menghubungkan antara teori dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia. Berdasarkan faktanya, siswa sekarang tiba ke sekolah tanpa persiapan dalam belajar. Biasanya, siswa dibatasi oleh pemahaman topik yang disampaikan, sehingga siswa kurang mampu dalam memahami topik yang rumit maupun menemukan hal yang tersembunyi karena strategi pembelajaran yang kurang tepat sasaran (Agustina, 2015)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan bahwa anak di sekolah minggu GBI Sukma Medan yang menjadi informan penelitian penulis ini, ketika mereka diwawancarai mengenai norma sopan santun dilihat bahwasannya mereka masih belum dapat menjelaskan apa itu norma sopan santun dengan jelas dan benar, serta beberapa dari mereka masih belum dapat juga menentukan dan memberikan contoh penerapan dalam norma sopan santun di dalam kehidupan bersekolah serta di dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diberikan pembinaan dengan teknik bercerita mengenai norma sopan santun dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ketika diwawancara kembali, dan memberikan pertanyaan yang khusus terkait dengan norma sopan santun, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya anak-anak sekolah minggu GBI Sukma Medan dapat mengerti dan mampu menjelaskan norma sopan santun, beserta dengan contoh penerapannya, dan disini peneliti sembari menyampaikan materi mengenai norma sopan santun, kemudian memberitahukan kepada mereka apa yang menyebabkan mereka masih kurang paham akan norma sopan santun, dan peneliti memberikan penjelasan juga terkait permasalahan yang diakibatkan sehingga mereka kurang memahami norma sopan santun dengan baik dan belum sesuai dengan yang seharusnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untaian dan ucapan kata terima kasih penulis tuturkan atas selesainya penelitian ini kepada segenap para anak di sekolah minggu GBI Sukma Medan yang dapat, bahkan telah sudi dan menerima penulis untuk melakukan penelitian di GBI Sukma Medan. Terima kasih penulis haturkan dan berikan kepada para pengurus gereja GBI Sukma Medan, karena telah meluangkan waktunya dan memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian terhadap objek yang telah penulis tentukan sebelumnya. Terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis atas segalanya doa dan kasih sayangnya, serta kepada dosen-dosen atas segala nasehat dan bimbingannya, serta kepada teman-teman Bilingual Pendidikan IPA 2019 (NSESP 2019) yang telah mendukung dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, D. G. (2005). *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Agustina, Y. (2015). Pengembangan Karakter Siswa Melalui Contextual Teaching and Learning Pada Pembelajaran Akuntansi di SMK (Suatu Kajian Teori). *Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015*, 23–32.
- Ainah, Sarbaini, & Adawiah, R. (2016). Strategi Guru PKn Menanamkan Karakter Sopan Santun dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.725>
- Alit, D. M. (2003). Kontribusi Faktor Lingkungan Sekolah, Lingkungan Keluarga, dan Motivasi Berprestasi terhadap Nilai Modern Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kabupaten Gianyar, Bali. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(6), 13–44. <https://doi.org/10.21831/pep.v5i6.2056>
- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral Education and Character Education: Their Relationship and Roles in Citizenship Education. *Journal of moral education*, 35(4), 495–518. <https://doi.org/doi.org/10.1080/03057240601012204>
- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-catatan Investigasi)*. IndoPROGRESS.
- Angelina, D. Y. (2013). Pola Asuh Otoriter, Kontrol Diri Dan Perilaku Seks Bebas Remaja SMK. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(2), 173–182. <https://doi.org/10.30996/persona.v2i2.106>
- Arikunto, S. (2010). *Metode peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariska, S. F., Marzuki, & Rosnita. (2018). Penanaman Nilai Kesopanan, Kejujuran dan Tanggung Jawab Menggunakan Model Tadzkirah di Sekolah Dasar Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(3), 1–10.
- Asrori, M. (2015). *Perkembangan Peserta Didik; Pengembangan Kompetensi Pedagogis Guru*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bulach, C. R. (2002). Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior. *The Clearing House*, 76(2), 79–83. <https://doi.org/10.1080/00098650209604954>
- Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dalyono. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djuwita, P. (2017). Pembinaan Etika Sopan Santun Peserta Didik Kelas V Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Nomor 45 Kota Bengkulu. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 10(1), 27–36. <https://doi.org/10.33369/pgsd.10.1.27-36>
- Ilahi, M. T. (2014). Peran Pendidikan Untuk Mengukuhkan Nasionalisme dan Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan*, 36(76), 41–46.

- Inrawati, P. (2015). *Peran Pendidik Dalam Mengembangkan Sikap Sopan Santun Pada Anak Usia Dini di Paud Muara Tenang Desa Posso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Kemendiknas. (2011). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- KEMENPPPA. (2018). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Koyan, I. W. (2001). Kontribusi Tripusat Pendidikan dan Religiusitas dalam Pembentukan Sikap terhadap Perilaku Disiplin. *Jurnal Kependidikan*, 1(31), 1–18.
- Lickona, T. (2009). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam.
- Mahfudz. (2010). Budaya Sopan Santun Yang Semakin Dilupakan. Diambil 12 Januari 2021, dari pdfslide.tips website: <https://pdfslide.tips/documents/52163161-budaya-sopan-santun-yang-semakin-dilupakan.html>
- Marzuki, & Fatma, A. S. (2015). Teaching With Heart at the Green School in Era of Information Technology. *Proceeding International Conference ,Tuesday : May 12th 2015*.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15–22. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Purwanto, M. N. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, F. R., Imron, A., & Benty, D. D. N. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Sopan Santun Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 73–82. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p182>
- Salahudin, A. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samani, M., & Hariyanto, M. S. (2011). Konsep dan Model Pendidikan Karakter. In *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, & Supardi. (2013). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri. (2012). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum*. Jakarta: Balitbang.
- Sulistyo. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Sunu, D. A., & Ujningsih. (2010). Pembudayaan Sikap Sopan dan Santun di Rumah dan di Sekolah Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Karakter Siswa. *Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Guru II*.
- Susanto, A. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana.

- Suyanto. (2010). *Model Pembinaan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Syamsiyatun, S., & Wafiroh, N. (2013). *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. Geneva: Globethics.net.
- Tohirin. (2006). *Psikologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Perdasa.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)* (Edisi Ketiga). Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibawa, A. C., Suyahmo, S., & Setiajid, S. (2012). Penanaman Nilai Moral Pada Anak Dalam Keluarga Nelayan Dukuh Tanjungsari. *Unnes Civic Education Journal*, 1(1), 1–7.
- Widodo, & Widayanti, L. (2013). Peningkatan Aktivitas Belajar dan Hasil Belajar Siswa dengan Metode Problem Based Learning pada Siswa Kelas VIIA MTs Negeri Donomulyo Kulon Progo Tahun Pelajaran 2012/2013. *Jurnal Fisika Indonesia UGM*, 17(49), 32–35. <https://doi.org/10.22146/jfi.24410>
- Winataputra, U. S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Konteks Kurikulum 2013. *Bahan Diskusi dalam Semnas PKn-AP3KnI*.
- Wiyani, N. A. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Yogyakarta: Pedagogia.
- Zaqiah, Q. Y., & Rusdiana, A. (2014). *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Pustaka Setia.
- Zuriah, N., & Yustianti, F. (2007). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.

ROLE PLAYING DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

T Heru Nurgiansah^{1*}, Hendri², Cep Miftah Khoerudin³

¹⁾ Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Pamulang, Tangerang Banten, Indonesia

³⁾ Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia

*nurgiansah@upy.ac.id

Abstract

The majority of students consider the subjects of Pancasila and Citizenship Education to be boring subjects. The content of many materials, monotonous media and learning models, until the teacher's ability in classroom management is signalled to be the cause that results in less motivation, activeness, and student achievement. A proper learning model is needed to overcome these learning problems, namely role-playing learning models. The purpose of this study was to see the phenomenon of learning Pancasila and Citizenship Education in Class X SMA PGRI 1 Kasihan Bantul. The research method used is the qualitative method with descriptive studies. Data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation. The results showed that the use of Role-Playing learning models succeeded in making the learning atmosphere more interesting, active, and successful in improving students' academic abilities, especially in the material of the National Legal and Judicial System.

Keywords: *role playing, learning, pancasila and citizenship education*

Abstrak

Mayoritas siswa menganggap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang membosankan. Isi materi yang banyak, media dan model pembelajaran yang monoton, sampai kemampuan guru dalam pengelolaan kelas disinyalir menjadi penyebabnya yang mengakibatkan motivasi, keaktifan, dan prestasi siswa menjadi kurang. Diperlukan sebuah model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan belajar tersebut, yakni model pembelajaran *Role Playing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kelas X SMA PGRI 1 Kasihan Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran *Role Playing* berhasil membuat suasana pembelajaran semakin menarik, aktif, dan berhasil meningkatkan kemampuan akademik siswa khususnya pada materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.

Kata kunci: *role playing, pembelajaran, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Kualitas pembelajaran yang baik merupakan dambaan semua pihak, baik pemerintah maupun warga sekolah. Pendidikan seyogyanya diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran (Kusnadi, Martini, & Nugraha, 2017). Kualitas pembelajaran yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Peningkatan kualitas pembelajaran dimulai dari hal terkecil terlebih dahulu seperti pelaksanaan pembelajaran di kelas yang optimal sehingga menghasilkan siswa siswi yang cerdas dan dapat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Pendidikan ibarat wadah untuk membentuk warga negara yang cerdas (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, guru dan lingkungan belajar (Hanum, 2020). Berbagai usaha sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Usaha pemerintah dalam memajukan pendidikan diantaranya pemberian beasiswa bagi masyarakat berprestasi dan kurang mampu, mengadakan tutorial dan pelatihan bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya, dan memperbaiki sarana prasarana sebagai penunjang pembelajaran karena infrastruktur yang semakin baik akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik bukan dilihat dari seberapa lama kita belajar dan seberapa banyak ilmu yang kita dapat. Memang belajar itu sepanjang hayat namun esensi dari slogan itu adalah kebermanfaatannya yang didapat dari proses belajar tadi. Teori tabularasa misalnya mengatakan bahwa anak itu ibarat kertas putih yang kosong, ketika anak tersebut belajar maka kertas tersebut menjadi penuh coretan bermakna. Coretan-coretan tersebut memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Dari ketiga contoh usaha pemerintah di atas, satu hal yang paling disorot adalah peningkatan kemampuan dan kompetensi guru. Hal tersebut diantaranya pengelolaan kelas, penyampaian materi ajar, dan penggunaan model pembelajaran. Guru memiliki multi tugas seperti sebagai pengajar, pembimbing, dan pelatih. Dari hasil observasi awal di Sekolah Menengah Atas PGRI 1 Kasihan Bantul, didapat fakta bahwa guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jarang menggunakan model pembelajaran interaktif karena kebanyakan menggunakan metode ceramah atau presentasi kelompok. Padahal seorang guru dituntut untuk mempunyai kemampuan menggunakan beragam model pembelajaran. Kemampuan dan kemauan guru untuk mahir dalam penggunaan berbagai model pembelajaran aktif masih kurang (Nurgiansah & Pringgowijoyo, 2020).

Selain itu, fungsi utama guru harus bisa menilai karakteristik dari siswanya yang nantinya akan memberikan gambaran model pembelajaran yang dapat digunakan. Guru harus mampu memahami beberapa hal dari peserta didik seperti kemampuan, potensi, minat, hobi, sikap, kepribadian (Nurgiansah & Sukmawati, 2020). Hal tersebut dapat diperoleh jika guru mempunyai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Selain itu seorang guru diharapkan mampu untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi situasi kondisi terkini (Nurgiansah, 2021a). Guru sebagai pengelola pembelajaran hendaknya mampu memilih dan menentukan model, metode, maupun media dalam menjalankan pembelajaran di kelasnya (Fitasari, Tohari, & Praptiningsih, 2015). Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk bisa berbicara di depan kelas dan menjadi *public speaking* yang handal (Nurgiansah, 2020).

Selain menitikberatkan pada permasalahan guru, yang tak kalah pentingnya adalah perilaku siswa dalam pembelajaran. Banyak masalah yang dihadapi siswa di kelas, seperti

kehilangan motivasi belajar dikarenakan tidak menyukai mata pelajaran tertentu, rendahnya partisipasi di kelas karena tidak mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sampai jebloknya prestasi akademik siswa yang dipengaruhi rasa malas belajar dan membaca. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku (Wibawa & Suarjana, 2019).

Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan bakat dan minat siswa sehingga siswa akan antusias terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah (Setiawan, 2014). Terlebih pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang isi materinya banyak dan menimbulkan rasa bosan. Tantangan dunia pendidikan saat ini yaitu menerapkan sistem pendidikan yang memungkinkan optimalisasi seluruh pihak, baik guru, siswa, maupun pemerintah (Gani, 2018). Dengan begitu, permasalahan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Persoalan-persoalan yang dihadapi siswa di kelas harus menjadi fokus utama seorang guru agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan jalan keluar yang tepat, cepat dan efisien yang salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran *Role Playing* atau bermain peran. Metode *role playing* atau dikenal dengan bermain peran merupakan salah satu bentuk drama. Dalam metode ini, siswa diminta untuk bermain suatu drama, secara spontan untuk memperagakan peran-perannya dalam berinteraksi. Peran yang dilakukan berhubungan dengan masalah maupun tantangan dan hubungannya dengan manusia.

Metode bermain peran merupakan suatu metode pembelajaran, di mana subjek diminta untuk berpura-pura menjadi seseorang dengan profesi tertentu yang digeluti orang tersebut. Selain itu, subjek juga diminta untuk berpikir seperti orang tersebut agar dia dapat mempelajari tentang bagaimana menjadi seseorang dengan profesi tersebut. Dalam penelitian ini, siswa akan berperan sebagai aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, pelaku dan korban.

Dari berbagai peran tersebut terdapat pada materi sistem hukum dan peradilan. Penelitian ini selain bertujuan untuk melihat partisipasi dan keaktifan siswa dalam belajar, juga untuk mengenalkan kepada siswa mengenai aturan hukum yang ada di negara Indonesia. Pemahaman siswa terhadap hukum perlu ditingkatkan agar menjadi warga negara yang baik, berpartisipasi dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Penelitian dilaksanakan di kelas X SMA PGRI 1 Kasihan Bantul Yogyakarta yang berjumlah 30 orang siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan pada saat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlangsung. Observasi berarti pengamatan secara langsung di lokasi penelitian (Nurgiansah, 2021b). Wawancara dilakukan terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagian siswa kelas X. Dokumentasi dilakukan sebagai arsip agar data yang telah diperoleh tidak hilang maknanya. Penelitian ini dilaksanakan pada materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Tahapan penelitian terdiri dari penyampaian materi, menentukan kasus tindak pidana, dan praktek peradilan semu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pembelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran *Role Playing*. Validasi data dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung di dalam kelas dengan melakukan pengukuran tingkat partisipasi dan keaktifan siswa sebelum menggunakan model *Role Playing* dan sesudahnya. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan penelitian, peneliti mewawancarai guru dan sebagian siswa yang terlibat dalam pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di hari Selasa mulai pukul 07.00 s/d 08.30 WIB. Penelitian dengan penggunaan *Role Playing* ini dilakukan selama dua kali pertemuan, dimana pertemuan pertama penyampaian materi dan langkah-langkah model pembelajaran *Role Playing*. Dan pertemuan kedua adalah praktek peradilan semu. Pembelajaran pertemuan pertama berjalan sebagaimana mestinya. Pembelajaran diawali kegiatan apersepsi yang terdiri dari guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengabsen siswa, dan menyampaikan indikator atau tujuan pembelajaran. Kegiatan tersebut berlangsung selama 10 menit yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan inti selama 60 menit. Kegiatan inti ini terdiri dari penyampaian isi materi mengenai sistem hukum dan peradilan nasional, diantaranya pengertian hukum menurut para ahli, macam-macam hukum, lembaga peradilan, dan kasus pelanggaran hukum. Selepas itu kegiatan penutup selama 20 menit yang diisi dengan tes tulis untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai materi yang telah disampaikan, dan penjelasan penggunaan model pembelajaran *Role Playing* yang akan dipraktikkan minggu depan. Adapun kasus yang akan diperankan adalah penganiayaan asisten rumah tangga.

Pada pembelajaran pertemuan pertama tersebut, siswa belum terlihat partisipasi dan motivasinya. Guru masih terlihat mendominasi pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan dan sesekali bertanya disertai senda gurau. Begitu juga dalam prestasi belajar, siswa masih banyak yang salah menjawab pertanyaan diakhir pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa tanpa menggunakan model pembelajaran tertentu, maka permasalahan siswa seperti motivasi, keaktifan, dan prestasi belajar tidak dapat diselesaikan dengan baik. Berawal dari masalah tersebut, maka pada pertemuan kedua, siswa akan bermain peran dalam kasus pelanggaran hukum. Siswa terbagi kedalam menjadi 2 kelompok masing-masing 15 orang dengan beberapa peran, diantaranya: 3 siswa menjadi hakim, 1 siswa menjadi panitera, 4 siswa menjadi penyidik kepolisian, 2 orang siswa menjadi saksi, 1 orang tersangka sekaligus terdakwa, 1 pengacara atau kuasa hukum, 1 jaksa penuntut umum, 1 orang korban serta 1 orang menjadi dokumenter.

Kegiatan dimulai saat korban dianiaya oleh tersangka dan dilihat oleh 4 orang siswa sebagai saksi, 2 siswa menjadi saksi yang meringankan di pengadilan, dan 2 siswa lagi menjadi saksi yang memberatkan. Lalu korban melaporkan ke kepolisian yang selanjutnya menangkap tersangka dan melakukan penyidikan serta memeriksa saksi dan melakukan rekonstruksi. Setelah berkas lengkap dan siap, tersangka pun menjalani proses persidangan yang di dalamnya terdapat penyampaian materi ajar yang berkenaan dengan sistem hukum dan peradilan nasional.

Gambar 1. Rekonstruksi



Adapun tahapan persidangan terdiri dari: (1) pembacaan dakwaan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, di dalamnya disampaikan pasal yang dikenakan. (2) pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa terhadap tuntutan hakim. Dalam hal ini terdakwa punya dua pilihan, yakni mengakui ataupun mengelak. (3) tahapan pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi yang menyampaikan kronologis kejadian. (4) pembacaan tuntutan mengenai berapa lama vonis terdakwa (5) pledoi atau pembelaan dari terdakwa (6) jatuhnya vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pembelajaran pada tahap dua berbeda jauh dengan pelaksanaan pembelajaran tahap pertama. Kali ini siswa memegang kendali pembelajaran, guru hanya memantau dan sesekali mengarahkan atau mengklarifikasi materi ajar. Siswa sangat antusias. Keaktifan dan motivasi belajar siswa meningkat pesat. Begitu juga dengan prestasi belajarnya pun meningkat. Hal ini dibuktikan dengan evaluasi berupa tes diakhir simulasi persidangan bahwa sebagian besar siswa dapat menjawab pertanyaan, hal ini berbanding terbalik saat pertemuan pertama saat materi disampaikan secara ceramah oleh guru.

Berdasarkan pelaksanaan model pembelajaran *Role Playing* tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya serta kendala dan solusi agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini adalah: (1) siswa memegang kendali pembelajaran/sangat dominan. (2) materi yang didapat mudah untuk diingat karena siswa terlibat langsung di dalamnya. (3) mampu menarik minat belajar siswa, partisipasi siswa, motivasi siswa, dan meningkatkan pemahaman terhadap isi materi.

Gambar 2. Jalannya Persidangan



Meskipun begitu, model ini memiliki kekurangan, diantaranya: (1) memerlukan waktu yang lama untuk mensimulasikan materi bahkan bisa lebih dari 1 kali pertemuan (2) sangat mementingkan kreativitas dan daya nalar siswa yang tinggi sehingga mengakibatkan sebagian siswa menjadi *down* dan tidak mau terlibat dalam pembelajaran (3) tidak semua materi dan tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan model pembelajaran ini.

Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan model pembelajaran *Role Playing*, diantaranya: (1) siswa nampak kebingungan diawal simulasi terutama kelompok 1 dikarenakan ini pertama kalinya siswa menggunakan model pembelajaran *Role Playing*. Untuk menghindari kejadian serupa, guru harus selalu menggunakan beragam model pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan agar menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Niska & Gregorius, 2013). (2) kelas menjadi gaduh namun tetap kondusif dikarenakan antusiasme siswa yang terlampau tinggi. Dengan begitu guru diharapkan mampu untuk mengelola kelas untuk menjaga kondusifitas dalam pembelajaran. (3) tidak cukup waktu untuk kelompok kedua dikarenakan kelompok pertama melebihi batas waktu yang telah diberikan. Hal ini wajar terjadi karena pada pelaksanaan pertama kali akan menghabiskan banyak waktu untuk beradaptasi.

Penelitian mengenai model pembelajaran *Role Playing* telah banyak dilakukan berbagai kalangan, baik itu guru dalam Penelitian Tindakan Kelas, maupun oleh mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Namun pada penelitian ini terdapat pembaruan diantaranya pembuatan dan penggunaan *name tag* yang menarik sehingga berhasil menstimulus minat belajar siswa jauh sebelum melaksanakan praktek. Di masa yang akan datang, peneliti bisa berimprovisasi lagi misalkan dengan penggunaan seragam sungguhan dan rekonstruksinya dilakukan di luar ruang kelas dengan kasus yang lebih rumit lagi seperti pencurian kendaraan roda dua, pembunuhan berencana, atau pencurian dengan pemberatan.

Model *Role Playing* merupakan model pembelajaran yang digagas untuk menghasilkan siswa yang turut berpartisipasi secara langsung. Model ini merupakan satu dari sekian banyak model pembelajaran interaktif. Model ini biasanya digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia karena art *Role Playing* ini artinya bermain peran. Permainan peran lebih banyak digunakan dalam materi drama. Namun pembaharuan dari artikel ini menunjukkan bahwa model pembelajaran *Role Playing* ini dapat digunakan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tentu saja disesuaikan dengan materi ajar. Penggunaan model dan media pembelajaran dapat menembus ruang dan waktu yang berarti keluwesan dan fleksibilitas dalam kegiatan belajar dapat optimal (Nurgiansah, 2019).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran ini merupakan multidisiplin ilmu karena didalamnya mencakup beberapa materi seperti hukum, politik, pemerintahan, sosial dan budaya. Pendidikan Pancasila juga bisa diasumsikan sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan nilai moral. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara agar mampu berpartisipasi (Telaumbanua, 2019). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang konten materinya mayoritas hafalan membawa kecenderungan para guru untuk terjebak pada metode belajar ceramah karena

guru tidak mau mencoba menggunakan beragam model pembelajaran yang menarik (Saffudin, 2013).

Partisipasi siswa dalam kegiatan belajar sangat penting karena belajar adalah proses transformasi pengetahuan secara dua arah antara guru dan siswa. Dengan pembelajaran dua arah maka suasana belajar di kelas menjadi lebih hidup dan materi yang dicerna oleh siswa lebih maksimal. Partisipasi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat dapat mengatasi persoalan termasuk dalam mengatasi persoalan pembelajaran di bidang pendidikan (Rachman & Fitra, 2020). Kedepan guru diharapkan lebih sering menggunakan beragam model dan media pembelajaran untuk mengatasi segala persoalan belajar di dalam kelas. Penyelesaian permasalahan belajar tidak selalu dengan Penelitian Tindakan Kelas, dapat juga melalui bimbingan konseling atau kegiatan eksperimen lainnya.

SIMPULAN

Penggunaan model pembelajaran *Role Playing* dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas X SMA PGRI 1 Kasihan Bantul pada materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional telah berhasil membuat kegiatan belajar mengajar menjadi menarik dan atraktif. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme, motivasi, dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran *Role Playing*. Peran guru dalam pembelajaran tidak lagi mendominasi sehingga siswa merasa dilibatkan dalam pembelajaran, dimulai dari pemilihan kasus, pembuatan media karton, sampai praktik peradilan semu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, diantaranya Kepala SMA PGRI 1 Kasihan Bantul Yogyakarta, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA PGRI 1 Kasihan dan Siswa Siswi Kelas X SMA PGRI 1 Kasihan. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Covid-19 Bagi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Basicedu: Research & Learning in Elementary Education*, 5(1), 367–375. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.669>
- Fitasari, D. N., Tohari, M., & Praptiningsih. (2015). Pengaruh Penggunaan Media Video pembelajaran Terhadap Minat Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas IX MTs NU Ungaran. *Jurnal Wasdapa UNDARIS*, 3(1), 55–67.

- Gani, A. A. (2018). Interaksi Antara Pemanfaatan Media Pembelajaran Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 83–87. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.677>
- Hanum, F. F. (2020). Konseptual Pemanfaatan Model Media Web Moodle Dalam Pembelajaran PPKN Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18700>
- Kusnadi, E., Martini, E., & Nugraha, G. N. (2017). Konstruksi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 150–163. <https://doi.org/10.31571/pkn.v1i2.611>
- Niska, B., & Gregorius, J. (2013). Penggunaan Media Poster Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 1–12.
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan*, 1(1), 95–102.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa PPKn Universitas PGRI Yogyakarta. *JNPM: Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16–23.
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Atas Se-Kabupaten Bantul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–33. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.566>
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47. <https://doi.org/10.47200/aoej.v12i1.423>
- Nurgiansah, T. H., & Pringgowijoyo, Y. (2020). Pelatihan Penggunaan Model Pembelajaran Jurisprudensial Pada Guru Di KB TK Surya Marta Yogyakarta. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*. *PKNSTAN*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/kuat.v2i1.661>
- Nurgiansah, T. H., & Sukmawati. (2020). Tantangan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 17(2), 139–149.
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289–303. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p%25p>
- Saffudin. (2013). Pengembangan E-learning Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Moodle di SMA Lampung Selatan. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 1(3), 1–12.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. *Jurnal*

Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2), 61–72.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285>

Telaumbanua, F. (2019). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning. *Jurnal Warta Dharmawangsa, 6(2), 14–23.*
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i62.503>

Wibawa, I. M. A. J., & Suarjana, I. M. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw I dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 3(1), 115–124.*
<https://doi.org/10.23887/jisd.v3i1.17665>

EFEKTIVITAS PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI MELALUI TEKNIK KLARIFIKASI NILAI PADA MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Maryatun Kabatiah

¹⁾ Universitas negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

maryatunkabatiah@unimed.ac.id

Abstract

Civic Education is a very important subject in efforts to build the nation's character. Character building through Civics includes integrating character values in lectures. Value clarification techniques are considered superior for affective learning (learning to form attitudes/values). Through value clarification, learning activities no longer require students to memorize and understand the values that have been chosen by others, but are assisted in finding, analyzing, taking responsibility, developing, choosing, taking attitudes, and practicing the values in their own lives. This research is a pre-experimental research design. The method used in this research is the Intact Group Comparison design method. The research subjects were students of the Department of Early Childhood Education (PAUD) UNJA who took the general course of civic education. Subjects were divided into 2 groups, namely the control group using the conventional approach, and the experimental group using the Value clarification techniques. The instrument used in this study is a test instrument. The collected data were analyzed using the t-test. Based on the results of the study, it can be concluded that the integration of character education in civic education courses through Value clarification techniques is more effective than conventional ones

Keywords: *character education, civic education, VCT*

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang sangat penting dalam upaya pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter melalui PKn di antaranya pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam perkuliahan. Teknik klarifikasi nilai dianggap lebih unggul untuk pembelajaran afektif (pembelajaran pembentukan sikap/nilai). Melalui pengklarifikasian nilai, kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar menuntut peserta didik agar hafal dan paham akan nilai-nilai yang sudah dipikirkan pihak lain, melainkan dibantu untuk mencari, menganalisa, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap, dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupannya sendiri. Penelitian ini adalah penelitian *Pre-Eksperimental Design*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rancangan *Intact Group Comparison*. Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) UNJA yang mengikuti mata kuliah umum PKn. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok

kontrol dengan menggunakan pendekatan konvensional, dan eksperimen menggunakan Teknik klarifikasi nilai. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata kuliah PKn melalui Teknik klarifikasi nilai lebih efektif dibandingkan dengan konvensional.

Kata kunci: pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, VCT

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter senantiasa menjadi topik yang marak dibicarakan pada level pendidikan dalam dua dekade terakhir. Komitmen secara nasional untuk menanamkan karakter melalui dunia pendidikan tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Selanjutnya pendidikan karakter juga menjadi sasaran dari pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, antara lain adalah dalam “mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”. Dalam hal ini berarti karakter merupakan suatu proses penanaman nilai termasuk di dalamnya budi pekerti, perilaku, moral yang berujung kepada hal positif dalam bentuk sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Lickona (2012) mengatakan bahwa karakter merupakan kepemilikan terhadap hal-hal yang baik, untuk menggambarkan bagaimana karakter melibatkan pengetahuan moral (*knowing of good*), perasaan moral (*feeling the good*), dan tindakan moral (*acting the good*). Kehidupan yang penuh kebajikan (*the virtuous life*) sendiri oleh Lickona dibagi dalam dua kategori, yakni kebajikan terhadap diri sendiri (*self-oriented virtuous*) seperti pengendalian diri (*selfcontrol*) dan kesabaran (*moderation*); dan kebajikan terhadap orang lain (*other-oriented virtuous*), seperti kesediaan berbagi (*generosity*) dan merasakan kebaikan (*compassion*).

Nilai-nilai karakter diyakini sebagai dasar dalam mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Raths, Harmin & Simon (dalam Adisusilo, 2012) "*values are general guides to behavior which tend to give direction to life*", nilai merupakan panduan umum untuk membimbing tingkah laku dalam rangka mencapai tujuan hidup seseorang. Salah satu upaya untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa adalah melalui pendidikan. Pendidikan karakter merupakan wadah pendidikan nilai, budi pekerti, moral dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan sikap dan kemampuan seluruh masyarakat agar dapat mempertimbangkan perbuatan baik-buruk, menanam kedisiplinan, menjadi contoh teladan, serta mempertahankan dan mewujudkan nilai-nilai kebaikan itu dalam kehidupannya secara mandiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan tahapan pembentukan karakter yang tidak kalah penting dari pembentukan karakter di tingkat sekolah, hal ini dikarenakan pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di persekolahan. Salah satu mata kuliah yang mengemban misi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Selanjutnya disebut PKn). Melalui koridor “*value-based education*”, PKn menjadi salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (Budimansyah, Ruyadi, & Rusmana, 2010). PKn baik dalam pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan di luar sekolah), maupun informal (pergaulan di rumah dan masyarakat), mempunyai visi sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial-kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan dalam diri warga negara dalam berbagai konteks (Winataputra, 2015). Pembangunan karakter melalui mata kuliah PKn di antaranya adalah dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam perkuliahan. Karakter tersebut antara lain memiliki nilai kekuatan spiritual keagamaan, moral, pengendalian diri, kepribadian serta akhlak mulia.

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan PKn membutuhkan suatu strategi atau rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik, monitoring dan evaluasinya pun harus sudah disusun dengan baik. Hal ini dilakukan agar indoktrinasi dalam pengintegrasian nilai-nilai karakter dapat dihindari, indoktrinasi dalam pengintegrasian nilai harus dihindari karena dikhawatirkan nilai-nilai karakter yang hendak ditanamkan menjadi tidak terinternalisasi apalagi diamalkan, karena kegiatan pembelajaran hanya sebatas pengenalan dan penghafalan nilai-nilai yang sudah ada atau ditetapkan oleh orang lain. Oleh karena itu mengingat mahasiswa sebagai kelompok idealis dengan segala kelebihan dan potensinya, pemberian pendidikan karakter bangsa kepada mereka memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus.

Menurut Simon (dalam Adisusilo, 2012) Pendekatan pendidikan nilai dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: (1) Memoralisasi (*Moralizing*), (2) Bersikap Membiarkan (*Laissez-faire Attitude*), (3) Menjadi Model (*Modelling*), (4) Teknik klarifikasi nilai/*Value clarification technique* (selanjutnya disebut VCT), bentuk dari pengembangan model ini dapat berupa pemecahan masalah, dialog, diskusi kelompok, dan presentasi. Di antara keempat pendekatan diatas, pendekatan VCT dianggap lebih efektif untuk pembelajaran pembentukan sikap dan pengintrasian nilai. Karena dengan klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghafal nilai-nilai yang sudah dipikirkan pihak lain, melainkan dibantu untuk mencari, menganalisa, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap, dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupannya sendiri (Simon dalam Adisusilo, 2012). Strategi instruksional yang digunakan dalam Pendekatan ini, pada dasarnya bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)”. Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah *problem solving learning*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *pre-eksperimental design* dengan metode rancangan *intact group comparison* yaitu penelitian variabel dengan membagi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono, 2010). Adapun subjek penelitian

adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) UNJA yang mengikuti mata kuliah umum PKn. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok kontrol dengan menggunakan pendekatan konvensional, dan kelompok eksperimen menggunakan teknik klarifikasi nilai. Pengambilan subjek berdasarkan teknik *purposive sampling* yakni berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan tertentu, serta berdasarkan karakteristik tertentu yang sebelumnya sudah diketahui (Arifin, 2012). Alasannya adalah karena diperlukan dua kelas yang homogen kemampuannya serta dapat mewakili karakteristik populasi. Selain itu kedua kelas memiliki ciri-ciri yang sama yakni merupakan kelas reguler sehingga kemampuan mahasiswa dianggap setara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes yakni hasil belajar kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) guna mengetahui perbedaan tingkat efektivitas pengintegrasian pendidikan karakter melalui pendekatan VCT dan pendekatan konvensional. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis menggunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKn memiliki tiga domain, yakni domain akademik; domain kurikuler; domain sosial-kultural (Winataputra, 2001). Berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan berada pada domain akademik adalah. Sementara konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal berada pada domain kurikuler. Sedangkan konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat berada pada domain sosial kultural (Wahab & Sapriya, 2011). Dengan demikian PKn domain kurikuler merupakan penempatan PKn dalam pendidikan formal (jenjang SD sampai perguruan tinggi) dan juga dalam pendidikan nonformal. Dalam domain ini PKn selain sebagai mata pelajaran yang diterapkan di persekolahan, PKn juga berfungsi sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi bahwa PKn merupakan bagian dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada semua jurusan di seluruh perguruan tinggi.

Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian PKn sangat erat kaitannya dengan pengintegrasian nilai-nilai atau pendidikan nilai yakni bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai yang harus dimiliki, dihayati dan diamalkan oleh seluruh masyarakat kepada peserta didik. Namun sebagai pusat pendidikan nilai, PKn bukanlah sekedar mentransmisikan nilai tertentu kepada peserta didik, tetapi dimaknai sebagai upaya mengembangkan proses penilaian dalam diri seseorang, semacam suatu keyakinan untuk memperkaya peserta didik dengan sesuatu yang lebih krusial dan fungsional (Aryani & Susatim, 2010). PKn dirumuskan secara luas yaitu mencakup proses penyiapan generasi muda atau warga negara menjadi lebih baik, demokratis, jujur, bertanggung jawab, mempunyai wawasan dan jiwa patriotisme, nasionalisme pada negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut menjadi warga negara yang ideal baik untuk dirinya, lingkungan dan juga masa depan bangsa (Hendri, 2020).

Tujuan utama dari pembelajaran PKn adalah untuk membentuk pribadi yang cerdas, terampil, demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, mempunyai warga negara yang bermoral dan mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. PKn harus mampu mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi generasi penerus bangsa melalui pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Materi PKn memprioritaskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. PKn sebagai mata kuliah yang mengemban misi pendidikan karakter, perlu mengukuhkan posisinya menjadi subjek pembelajaran nilai yang kuat. Pembangunan karakter melalui mata kuliah PKn di antaranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam perkuliahan.

Sebagai langkah awal dalam pengintegrasian nilai-nilai karakter perlu dilakukan sebuah inovasi pembelajaran dengan penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat, penanaman nilai tidak cukup hanya menggunakan metode ceramah murni, tetapi perlu divariasikan dengan metode pembimbingan yang dapat mengungkapkan nilai, seperti analisis nilai dan VCT. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall (dalam Adisusilo, 2012), bahwa melalui VCT peserta didik tidak lagi menghafal nilai-nilai yang dipilih oleh orang lain melainkan dibantu untuk mencari, menganalisis, mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai ia pilih sendiri. Peserta didik tidak dipilhkan nilai yang baik dan benar untuk dirinya, melainkan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri terhadap nilai-nilai mana yang mau dikejar, diperjuangkan dan diamalkan dalam hidupnya.

VCT merupakan salah satu pendekatan yang dapat memenuhi tujuan pencapaian pendidikan nilai, karena pada prosesnya VCT berfungsi untuk: a) mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa tentang suatu nilai; b) membina kesadaran mahasiswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik yang positif maupun yang negatif untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembetulannya; c) menanamkan suatu nilai kepada mahasiswa melalui cara yang rasional dan diterima mahasiswa sebagai milik pribadinya. Dengan kata lain, VCT dimaksudkan untuk membiasakan dan membimbing mahasiswa tentang bagaimana cara menilai, mengambil keputusan terhadap suatu nilai umum untuk kemudian dilaksanakannya sebagai warga masyarakat. Langkah-langkah VCT yang digunakan dalam pembelajaran di kelas eksperimen antara lain: *Pertama*, penentuan stimulus yang bersifat dilematik melalui peragaan, membacakan, atau meminta bantuan mahasiswa untuk memeragakan, yang melahirkan kegiatan yang meliputi: pengungkapan masalah, identifikasi fakta yang dimuat stimulus, menentukan kesamaan pengertian yang perlu, menentukan masalah utama yang akan dipecahkan VCT; *kedua*, penentuan pendapat berupa penentuan pilihan individual, penentuan pilihan kelompok dan kelas, klasifikasi atas pilihan tersebut); *ketiga*, menguji alasan, yakni mencakup kegiatan: meminta argumentasi mahasiswa/ kelompok /kelas, pemantapan argumentasi melalui: mempertentangkan argumen demi argumen, penerapan kejadian secara analogis, mengkaji akibat-akibat penerapan tersebut, mengkaji kemungkinan dari kenyataan; *keempat*, pada tahapan penyimpulan dan pengarahan dilakukan penarikan kesimpulan melalui: para mahasiswa/kelompok/kelas, dan penyimpulan dan pengarahan oleh dosen, dan yang *kelima* adalah tindak lanjut (*follow up*), tindakan lanjutan berupa kegiatan perbaikan atau pengayaan, kegiatan ekstra/ latihan /uji coba penerapan. Hasil

dari seluruh kegiatan akan dikumpulkan dalam satu portofolio, untuk kemudian dievaluasi.

Berdasarkan analisis deskriptif data penelitian terhadap hasil belajar mahasiswa di kelas kontrol dan eksperimen, diperoleh hasil bahwa nilai rerata (*mean*) kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yakni kelas eksperimen dengan nilai mean 78,81, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 70,24. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat meliputi dua uji yaitu uji normalitas dan homogenitas. Dari hasil uji normalitas yang dilakukan didapatkan hasil sig. kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,173. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol mempunyai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas eksperimen mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain data kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen berdistribusi normal. Sementara uji homogenitas adalah suatu uji prasyarat yang berfungsi untuk mengetahui kehomogenitasan data penelitian. Hasil uji homogenitas yang dilakukan mendapatkan hasil adalah 0.835. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa kelas kontrol dan eksperimen mempunyai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau dengan kata lain bahwa data kelas kontrol dan eksperimen mempunyai varian yang sama atau homogen.

Analisis data terakhir sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengujian hipotesis adalah uji-t yang menggunakan *independent sample t-test* sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji t Skor Hasil Belajar PKn Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

		Levene's Test For Equality of Variance								
		f	sig	t	Df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std.error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper	
Hasil Belajar	Equal variance assumed	.144	.042	2.085	28	.019	-8557	3.6864	-18.0410	-6.1539
	Equal variance not assumed			2.077	23.653	.019	-8557	3.5233	-17.4823	-8.8236

Berdasarkan hasil uji *independent sample t-test* menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Sebagaimana diketahui bahwa t_{tabel} adalah 2,048 sedangkan t_{hitung} adalah 2,085 serta signifikansi dari hasil uji *t independent sample t test* adalah $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} atau $2,085 > 2,048$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau $0,042 < 0,05$. Dari kesimpulan tersebut, dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak sehingga H_a diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan tingkat efektivitas pengintegrasian pendidikan karakter melalui pendekatan VCT dengan pendekatan konvensional dalam mata kuliah PKn. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata kuliah PKn melalui pendekatan VCT lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Sebagaimana yang dikemukakan Cheppy (dalam Adisusilo, 2012) kekuatan pendekatan ini adalah memberikan penghargaan yang tinggi kepada peserta

didik sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dan bertindak berdasarkan kepada nilainya sendiri.

Pendekatan VCT terbukti lebih efektif dalam pengintegrasian pendidikan karakter pada mata kuliah PKn karena pendekatan VCT lebih menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang nantinya nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Dengan klarifikasi nilai, seseorang tidak disuruh menghafal nilai-nilai yang sudah dipikirkan pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisa, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap, dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupannya sendiri. VCT lebih efektif karena mempunyai tahapan-tahapan dimana peserta didik diberi keleluasaan dalam menentukan dan memilih nilai-nilai yang akan diinternalisasikan dalam kehidupannya, dalam hal ini peserta didik menempuh tahapan klarifikasi nilai diantaranya: *Pertama*, kebebasan memilih, terdiri tiga tahap yaitu: (a) memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik; (b) memilih dari berbagai alternatif, artinya menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas; dan (c) Memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. *Kedua*, tahap menghargai, terdiri dari dua tahap yaitu: (a) adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya; (b) menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. *Ketiga*, tahap berbuat, terdiri dari dua tahap yaitu: (a) kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya; (b) mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya, artinya nilai yang menjadi pilihannya harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari (Jerolemik dalam Sanjaya, 2008).

Dengan demikian pendekatan VCT dapat melatih mahasiswa untuk berproses melakukan penilaian terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat dan dapat menetapkan nilai-nilai yang menjadi acuan hidupnya untuk perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Pada saat para mahasiswa diperkenalkan pada sejumlah persoalan yang terkait dengan bahan pelajaran akan menyadarkan mereka bahwa belajar sesungguhnya harus sampai pada adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, bukan menghafalkan seenggok fakta dan data.

Pendekatan VCT tentunya juga mengandung kelemahan sebab kriteria benar-salah dapat bersifat relatif, dan sangat mementingkan nilai perseorangan. VCT memang dikembangkan dalam budaya barat yang cenderung amat individualistis dan liberal. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus bijak dalam memberi pendampingan agar dalam pemilihan, penentuan nilai, peserta didik tidak tercabut dari akar budayanya. Dalam tatanan bangsa Indonesia tentunya batasan nilai-nilainya adalah nilai-nilai pancasila itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis deskriptif data penelitian diperoleh hasil bahwa nilai rerata (*mean*) kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yakni kelas eksperimen dengan nilai mean 78,81, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 70,24. Selanjutnya dari hasil uji hipotesis didapat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,085 > 2,048$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau $0,042 < 0,05$. Dari hasil tersebut, dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak sehingga H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan tingkat efektivitas pengintegrasian pendidikan karakter melalui pendekatan VCT dengan pendekatan konvensional dalam mata kuliah PKn.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan seluruh pimpinan Universitas Jambi dan LPPM Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan secara penuh terhadap keterlaksanaan penelitian ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga, kolega dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2012). *Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aryani, I. K., & Susatim, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budimansyah, D., Ruyadi, Y., & Rusmana, N. (2010). *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hendri. (2020). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 35. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.18702>
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (J. A. Wamaungo, Penerj.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Direktur Jenral Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganeraan*. Bandung: Alfabeta.

Winataputra, U. S. (2001). Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan. *Makalah Lokakarya Civic Education Dosen IAIN/STAIN Se-Indonesia, Sawangan Depok.*

Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis-epistemologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.



Diterbitkan oleh:

Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Medan

Jln. Willem Iskandar, Pasar V, Medan, Kode Pos 20221

Telp. (061) 6625973, 6613276, 6618754, 6613365, Fax. (061) 6614002

Email: kewarganegaraan@unimed.ac.id

Laman: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk>

p-ISSN



e-ISSN

